



News Letter

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Edisi 07/NL/07/2016

Juli 2016

Mekanisasi Pertanian Jadi Solusi Atasi Masalah Pertanian

Kementan Berikan Bantuan
Untuk Jepara Jadikan Lumbung Pangan



**Menteri Pertanian
Republik Indonesia**



Dr. Ir. H. Amran Sulaiman, MP

Mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul Fitri

1 Syawal 1437 H

*Mohon Maaf
Lahir dan Batin*

**“Taqabbalallahu Minna Waminkum
Ja’alanallahu wa iyyakum....
Minal’Aidin Wal Faizin”**

Mekanisasi Pertanian Jadi Solusi Atasi
Masalah Pertanian

03

Kejar Target 1 Juta Ha LTT Padi
Kementan Kunjungi Tiap Provinsi

14

Kementan Berikan Bantuan
Untuk Jepara Jadikan Lumbung Pangan

04

Kementan Jadikan Jawa Barat
Sebagai Penopang Utama Pangan

15

Tekan Harga Daging Sapi
Kementan Lakukan Operasi Pasar di
Pasar Tradisional

05

Indonesia Harus Keluar dari
Ketergantungan Impor Pangan

17

Mentan Minta Tingkatkan Luas
Tambah Tanam Untuk Atasi Produksi
Musim Paceklik

07

Mentan: “Harus Ada Sinergisitas Agar
Pertanian Bisa Maju”

18

Lewat Momentum Acara Halal Bi Halal
Mentan Apresiasi Kinerja
PNS Kementan

09

Mentan: “Perlunya Integritas Pada
Pekerjaan Dalam Bekerja”

20

Untuk Pangkas Rantai Distribusi Pangan
Kementan Gandeng Koperasi

21

Mentan Dapat Apresiasi Dari Presiden
Mampu Atasi Harga Bawang dan
Tekan Impor Jagung

10

Kementan Beri Perhatian Lebih
Pada Potensi Pertanian di Daerah

23

Mentan: “Jangan Import Jagung Kalau
Petani Bisa Berproduksi”

11

Perlunya Penambahan Substansi
Dalam UU Karantina Untuk Perkuat
Karantina Pertanian

24

Pemprov Jawa Timur Optimis Capai
Target Luas Tambah Tanam

12

Kementan Terapkan Self Bloking Untuk
Tindakanjuti Penghematan Anggaran

25

Pengarah
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian

Penanggung Jawab
Ir. Marihot H. Panggabean, M.Si

Penyunting
Agus Sumantri, S.Sos

Pelaksana
Dra. Ria Satiti Irawati
Imam Santoso, SE

Anggota
Alice Raga Dewi, S.Sos
Ir. Rusman
Fajar Rahman, M.S.Ikom

Distribusi
Makmur

Narasumber
Pejabat Kehumasan unit Eselon I
Lingkup Kementerian Pertanian

Mekanisasi Pertanian Jadi Solusi Atasi Masalah Pertanian



Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman usai menghadiri kegiatan reuni dan silaturahmi Teman Kuliah Pertanian (TKP) Universitas Hasanuddin Makassar



"Salah satu solusi masalah peningkatan produksi pertanian Indonesia adalah menerapkan mekanisasi pertanian. Mekanisasi menjadi solusi ketika jumlah tenaga kerja di sektor pertanian semakin menurun karena para pemuda lebih banyak yang memilih meninggalkan desa"

Para sarjana pertanian harus dapat memberikan dharmabaktinya dalam membangun sektor pertanian, demikian yang dikatakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menghadiri kegiatan reuni dan silaturahmi Teman Kuliah Pertanian (TKP) Universitas Hasanuddin di Benteng Rotterdam, Makassar (9/7).

"Peran serta para alumni sarjana pertanian untuk menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan bidang pertanian adalah sangat penting agar swasembada pertanian dapat tercapai, sehingga tidak perlu mengimpor lagi komoditi-komoditi tertentu, misalnya kedelai yang merupakan bahan baku tempe dan tahu" kata Mentan.

Dalam acara yang dihadiri Wakil Gubernur Sulsel, Wakil Wali Kota Makassar dan anggota DPR RI, Mentan mengatakan salah satu solusi masalah peningkatan produksi pertanian Indonesia adalah menerapkan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian, juga mampu menurunkan biaya produksi hingga 40 persen, dan meningkatkan efisiensi waktu tanam hingga panen.

"Solusi pertanian Indonesia adalah mekanisasi, makanya kami memberikan 'combine harvester' atau mesin panen kombinasi dan rice planter atau mesin

penanam padi, mekanisasi menjadi solusi ketika jumlah tenaga kerja di sektor pertanian semakin menurun karena para pemuda lebih banyak yang memilih meninggalkan desa" ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa dengan mekanisasi, panen yang biasanya butuh 20 orang, dalam empat jam selesai, kalau negara-negara Eropa saja yang hanya punya waktu tanam tiga bulan bisa swasembada, kenapa Indonesia yang punya waktu tanam 12 bulan tidak bisa.

Untuk penerapan mekanisasi di bidang pertanian, Mentan mengatakan Kementan terus memotivasi agar para peneliti pertanian di Indonesia dapat berinovasi menciptakan berbagai mesin pertanian, diantaranya dengan memberikan royalti yang memadai.

"Saya mengajak semua pihak khususnya para peneliti dan petani untuk bekerja keras bagi kemajuan pertanian Indonesia Baru-baru ini kita minta dibuatkan mesin panen jagung, dan akan diberikan royalti lima hingga sepuluh persen," jelas Mentan.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu'mang bahwa mekanisasi pertanian juga dapat menjadi solusi bagi masalah semakin berkurangnya minat anak muda menjadi petani.

"Saat ini semakin sulit mencari tenaga penanam karena anak muda tidak lagi tertarik bertani, dengan adanya mesin penanam 'rice planter,' menanam bisa dilakukan lebih cepat dengan lebih sedikit tenaga kerja," Wakil Gubernur Sulsel.

Wakil Gubernur Sulsel mengusulkan kepada Kementerian Pertanian agar penerapan mekanisasi pertanian dilakukan secara massal. Penerapan mekanisasi pertanian, secara massal akan mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

"Mekanisasi pertanian secara massal dapat meningkatkan produksi pertanian, salah satunya dengan menekan tingkat kehilangan hasil, penggunaan mesin panen kombinasi misalnya, dapat menekan tingkat kehilangan hasil hingga berkisar satu persen.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Sulsel Fitriani mengatakan pihaknya telah memperkenalkan penggunaan mesin - mesin pertanian, untuk meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga.

"Sejauh ini, mesin-mesin pertanian mulai banyak digunakan di sentra-sentra produksi padi di Sulsel. Awalnya mesin kami berikan untuk memotivasi petani, kemudian setelah melihat bahwa ini memang menguntungkan, petani mengadakan secara mandiri," jelas Plt Kadinastan Sulsel.

Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Muhammad Syakir mengatakan Balitbangtan telah berupaya meningkatkan mekanisasi pertanian, diantaranya dengan meningkatkan bantuan alat mesin pertanian. Untuk tahun 2016 akan diberikan bantuan alat mesin pertanian hingga 100 ribu unit.



Kementan Berikan Bantuan Untuk Jepara Jadikan Lumbung Pangan

“Wilayah Jepara bisa menjadi lumbung pangan, khususnya untuk jagung Kementan akan menyiapkan lahan sampai 10 ribu hektar dan benih gratis serta pupuk herbisida. untuk mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Jepara, Kementan memberikan sejumlah alat dan mesin pertanian kepada para petani”



Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberi sambutan pada acara panen tanaman padi di Desa Batu Kali, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara



Sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, Pemerintah akan terus memantau ketersediaan dan harga pangan nasional. Pemerintah menyadari Indonesia sebagai Negara yang besar dan memiliki kekayaan bahan pangan, pemerintah mengajak masyarakat tani untuk memproduksi pangan dalam mencapai kedaulatan pangan.

“Kabupaten Jepara sebagai salah satu daerah lumbung pangan. Untuk itu, Kabupaten Jepara harus siap sebagai salah satu daerah lumbung pangan,” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat menghadiri panen tanaman padi di salah satu lahan sawah di Desa Batu Kali, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, (14/7).

Mentan menuturkan bahwa wilayah Jepara bisa menjadi lumbung pangan, khususnya untuk jagung Kementan akan menyiapkan lahan sampai 10 ribu hektar dan benih gratis serta pupuk herbisida. Yang penting adanya lahan, apa lagi dengan adanya La Nina. maka Jepara diharapkan akan menjadi lumbung pangan jagung.

Sebagai bantuan untuk mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Jepara, Kementan memberikan sejumlah alat dan mesin pertanian kepada para petani.

Mentan pun sempat memberikan tambahan bibit jagung gratis sebagai permintaan maaf atas keterlambatannya.

“Kementan memberikan puluhan traktor, sepuluh ribu bibit jagung, 14 ribu bibit padi. Bahkan untuk bibit jagung juga diberikan pupuk dan obat gratis. Kami menginginkan agar puluhan lahan di Kabupaten Jepara dapat dimanfaatkan secara maksimal” kata Mentan.

“Jika Pemerintah Kabupaten Jepara belum atau tidak siap maka usulan tersebut akan ditarik kembali dengan begitu bantuan yang telah diberikan akan kami tarik kembali,” kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan dengan bantuan mesin panen, usai panen Musim Tanam II (MT II), petani bisa langsung kembali menggarap sawah. Pasalnya, dengan bantuan mesin panen waktu yang dibutuhkan petani untuk memanen padi lebih cepat. Sehingga i pada Januari bisa panen lagi.

“Saat ini petani diuntungkan dengan datangnya la nina pada Agustus hingga Desember. Pasalnya, la nina yang basah akan hinggap di Indonesia. Jika tidak dimanfaatkan, maka petani akan kehilangan momentum bisa tanam dan panen padi sepanjang tahun”terang Mentan.

Dalam rangka menghadapi fenomena alam la nina yang basah di Indonesia,

kepada petani di Tanah Air, Mentan menyarankan setelah panen pada musim tanam kedua segera menanam kembali, sehingga pada bulan Januari hingga Februari bisa panen kembali. Pasalnya, la nina diperkirakan terjadi hingga bulan Desember mendatang. Jika tidak dimanfaatkan, petani bisa kehilangan momentum tanam dan panen padi sepanjang tahun, dari hasil koordinasi dengan BMKG, la nina datang pada saat yang tepat.

“Iklim basah tersebut, diperkirakan terjadi hingga Desember. Apabila tidak dimanfaatkan, bisa berpotensi terjadinya musim paceklik. Hari ini kita sudah panen gadu. Rencana kita selesai panen langsung kita tanam. Kenapa kita harus turun langsung bulan Juli-September, karena ini jatuhnya panen Desember-Februari. Kalau Juli-September luas tambah tanamnya kecil, panennya jadi paceklik. Kita target 3 bulan ke depan minimal 1 juta sebulan. Jadi tidak ada lagi cerita musim paceklik di Indonesia,” ucap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menerangkan bantuan dalam bentuk alat pertanian, mulai traktor maupun alat tanam lainnya ke Jepara menguntungkan khususnya pada petani. Apalagi Gapoktan di Kabupaten Jepara yang sudah menerapkan pertanian modern berada di Desa Ujung Pandan Kecamatan Welahan. Dari 11 Gapoktan, satu sudah menggunakan sistem pertanian modern. Sedangkan 10 Gapoktan lainnya masih rintisan pertanian modern.

Bupati Jepara membeberkan, 10 Gapoktan rintisan pertanian modern yaitu Gapoktan Tani Mukti Desa Kelet Kecamatan Keling, Gapoktan Gondo Arum Desa Tubanan Kecamatan Kembang, Gapoktan Tani Rejo Desa Batukali Kecamatan Kalinyamatan, Gapoktan Tani Barokah Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan, Gapoktan Suka Maju Desa Semat Kecamatan Tahunan, Gapoktan Amanah Tani Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari dan Gapoktan Dewi Sri Desa

Tigajuru Kecamatan Mayong.

Bupati Jepara juga menyampaikan, permasalahan yang terjadi di Jepara, salah satunya lahan tanaman padi yang ada merupakan tadah hujan. Akibatnya, musim panen tidak menentu karena pasokan airnya bergantung pada curah hujan. Sementara sungai sebagai salah satu sumber air untuk irigasi pertanian, belum bisa diandalkan karena mengering

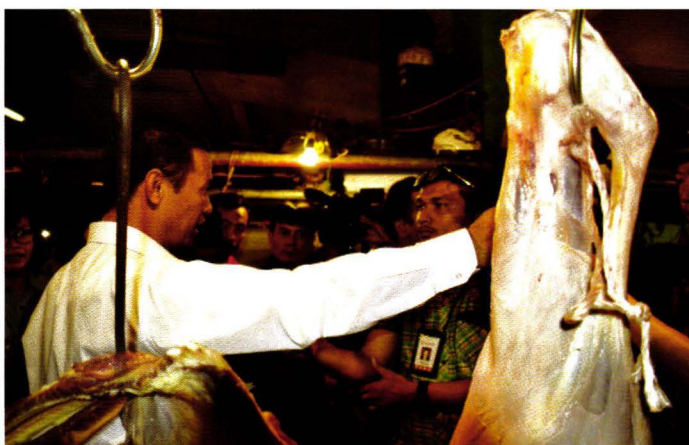
"Karakter tanah di Jepara adalah tadah hujan sehingga bergantung pada air hujan sehingga pengaturan tanam tidak bisa sesuai keinginan petani. Untuk itu, bantuan dari Kementan diharapkan

dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kami berharap dan meminta kepada pak Mentan khususnya penganggaran pembuatan bendung di Batealit agar bisa direalisasikan" ujar Bupati Jepara.

Bupati Jepara berharap, rencana pembangunan bendungan di Somosari, Kecamatan Batealit, Jepara, bisa segera direalisasikan agar bisa dimanfaatkan untuk irigasi pertanian serta pengendali banjir. Selain itu, juga diharapkan adanya bantuan normalisasi sungai dan saluran irigasi yang mengalami sedimentasi. Menurut Bupati Jepara, di antara kelemahan dunia pertanian di Jepara adalah selain masalah pengairan,

masalah lainnya adalah kurangnya kader tenaga kerja muda yang bersedia terjun ke dunia pertanian. Banyak yang tidak tertarik sehingga perlu untuk dilakukan pelatihan bagi para generasi muda.

"Kami berharap selain bantuan perbaikan irigasi juga bantuan pelatihan kepada generasi muda khususnya dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian. Generasi muda di Jepara tidak tertarik di bidang pertanian, sehingga Pemerintah Pusat perlu memberikan bantuan untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut," ujar Bupati Jepara.



Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Sidak untuk memantau perkembangan pasokan dan harga daging sapi di pasar tradisional Pecah Kulit, Tambora, Jakarta

Tekan Harga Daging Sapi Kementan Lakukan Operasi Pasar Di Pasar Tradisional

"Sebagai upaya untuk menekan harga daging sapi di pasaran sehingga masyarakat dapat menikmati daging dengan harga yang terjangkau selama bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Kementan bersama dengan sejumlah perusahaan melakukan operasi pasar besar-besaran yang difokuskan di 18 pasar tradisional di wilayah Jabodetabek "

Kebijakan penyaluran daging beku impor tak serta merta langsung membuat harga daging sapi segar bisa turun dalam waktu dekat, untuk itu pihak Kementerian Pertanian giat menyambangi pasar - pasar

tradisional. Tujuannya hanya satu, memastikan harga dan pasokan daging sapi beku tercukupi dan dijual di bawah harga Rp 80.000/kg, sesuai permintaan Menteri Pertanian pada importir untuk menggelontorkan daging pada saat menjelang Lebaran.

"Kedatangan kami ke pasar untuk mengecek langsung kebenaran isu importir yang belum mematuhi instruksi pemerintah untuk menjual harga di bawah Rp. 80 ribu per kg. Jadi kenapa kami masih perlu mengecek ke lapangan,

karena banyak isu berkembang, kalau importir akan menaikkan harga daging sapi," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat Sidak untuk memantau perkembangan pasokan dan harga daging sapi di pasar tradisional, di Pasar Pecah Kulit, Tambora, Jakarta (2/7).

Kementan bersama dengan sejumlah perusahaan melakukan operasi pasar besar-besaran untuk menekan harga daging sapi selama bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Operasi pasar tersebut difokuskan di 18 pasar tradisional di wilayah Jabodetabek sebagai upaya untuk menekan harga daging sapi di pasaran sehingga masyarakat dapat menikmati daging dengan harga yang terjangkau.

Mentan mengaku pihak Kementan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional guna memantau langsung kebenaran isu importir yang belum mematuhi instruksinya. Sebagaimana diketahui, tujuan pemerintah melakukan sidak ke pasar untuk memastikan harga dan pasokan daging sapi beku tercukupi. Harga daging yang diinginkan pada importir di bawah Rp. 80 ribu per kilogram.

"Kebijakan penyaluran daging beku impor tidak langsung bisa membuat harga daging sapi berpengaruh secara cepat di pasar tradisional. Memang turunnya belum seperti harapan. Tapi yang penting ada daging yang disiapkan, harganya Rp 75 ribu per kg. Nanti akan dilanjutkan terus setelah Lebaran," jelas Mentan.

Mentan mengungkapkan daging yang akan disiapkan sampai setelah Lebaran, akan disuplai terus ke pasar-pasar, baik karkas dan daging yang beku. Tujuannya harga daging bisa turun seperti yang diinginkan Presiden.

"Keberadaan daging impor ini merupakan penyeimbang kebutuhan daging sapi untuk Jabodetabek yang digelontorkan sebanyak 80%. Sedangkan diketahui daerah NTT, NTB, Jatim, Sulsel merupakan sentra produksi sapi lokal andalan" ungkap Mentan.

Mentan mengatakan daging beku dan segar memiliki protein yang sama meskipun yang disediakan pada Ramadan tahun 2016 hanya ada sapi beku. Daging tersebut tidak berbeda dengan yang frozen. Yang penting bagi pihak Kementan adalah inginkan suatu edukasi ke masyarakat, bahwa tubuh manusia membutuhkan protein.

"Paling penting ada daging yang 1 kg



sudah di bawah Rp. 80 ribu, sesuai arahan pak Presiden, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus menekan harga daging di bawah Rp. 80 ribu per kilogram (kg). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu meminta importir dan BUMN terus menggelontorkan daging sapi beku selama Ramadan tahun ini" kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menegaskan bahwa Pemerintah bersikeras agar harga daging bisa capai Rp. 80.000 per kg. Segala upaya yang dilakukan, selain 'memperbolehkan' impor daging sapi juga mendistribusikan daging sapi beku ke pasaran. Kementerian Pertanian sendiri menerbitkan rekomendasi izin impor untuk feedloter setiap 3 bulan sekali. Terbaru, pada kuartal II 2016, Kementerian Pertanian mengeluarkan kuota impor sebanyak 250.000 ekor sapi untuk 39 feedloter. Sapi bakalan tersebut akan digemukkan selama 3 bulan untuk memenuhi kebutuhan daging di kuartal IV 2016.

"Izin dari Kementan inilah yang jadi bekal para feedloter mengajukan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Kementerian Pertanian juga meminta 12 perusahaan importir menggelontorkan daging sapi beku ke pasaran. Tujuannya, agar harga daging sapi bisa ditekan di bawah Rp. 80.000/kg. Kedua belas perusahaan tersebut di luar importir swasta yang telah ditunjuk langsung Kemendag. Kementan akan menambah jatah kuota impor daging sapi, jika 12 importir itu mampu merealisasikan penjualan daging sapi beku sesuai yang diminta Kementan" tegas Mentan.

Menurut Mentan, penambahan kuota impor tersebut masih akan dibahas lagi pasca Lebaran nanti. Kementan masih belum menghitung berapa tambahan kuota untuk 12 importir tersebut. Daging impor yang juga tak hanya dibatasi pada daging saja, namun juga bisa berbentuk karkas.

"Justru kami mau setting ini selesai

Lebaran. Karkas masuk, jeroan juga bisa masuk. Nanti yang frozen tidak hanya yang kecil-kecil berupa potongan 1 kg saja. Karkas dan jeroan akan bisa masuk. Pokoknya kami tambah sesuai kebutuhan masyarakat," kata Mentan.

Sebagaimana diketahui daging sapi impor beku yang dijual di Pasar Pecah Kulit berasal dari importir daging. Ketika berlanjut mengunjungi pasar Mayestik, Mentan melihat lapak-lapak di pasar Mayestik juga menjual daging jenis karkas frozen yang dahulunya dilarang setelah sekian lama terdapat regulasi pembatasan penjualan daging karkas ke pasar tradisional. Program pemerintah untuk penjualan daging karkas ke pasar tradisional merupakan solusi jangka panjang untuk membentuk struktur pasar baru. Untuk itu ke depan semua regulasi yang menghambat akan dicabut

"Luar biasa tadi kita lihat daging beku dan karkas sudah masuk di lapak-lapak yang selama ini tidak menerima daging beku dan karkas. Dahulu daging jenis frozen, karkas dilarang masuk ke pasar tradisional, tetapi sekarang draft nya sudah selesai, rakortas sudah setuju peraturan tersebut kami cabut, sehingga daging sapi frozen akan terus-menerus tersedia di pasar tradisional, bukan hanya selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri saja dan masyarakat dapat memilih daging dengan variasi harga ada Rp. 115.000/kg, Rp 120.000/kg dan ada Rp. 85.000/kg" imbuh Mentan.

Ketika ditanya oleh para pihak media massa mengenai variasi harga yang ditawarkan para pedagang Mentan memberikan penjelasan bahwa biarkan masyarakat memilih sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Berdasarkan pantauan, harga daging sapi segar di Pasar Pecah Kulit, dijual pada kisaran Rp. 110 ribu per kg dan daging beku (frozen) pada kisaran Rp. 75 ribu.

"Yang penting pemerintah telah berusaha menghadirkan daging sapi murah untuk masyarakat. Daging saat ini sudah masuk pasar becek, dan sudah ada

daging di bawah 80 ribu. Ada yang harga Rp80 ribu sudah terpenuhi, ada yang mau beli Rp110 ribu silakan. Ini buktinya sudah ada yang Rp80 ribu per kg,” jelas Mentan.

Mengenai impor daging apakah pemerintah akan menambah volumenya untuk memenuhi kebutuhan daging pada masyarakat, Mentan menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan impor daging, tetapi harus tetap sesuai besaran kebutuhan daging yang diperhitungkan oleh pemerintah bukan semata mata keinginan para importir daging.

“Target Kita tetap melindungi dan mengembangkan petani peternak nasional hingga swasembada protein heAwani dicapai bukan hanya sapi daging ayam dan telur kita sudah swasembada bahkan ekspor daging ayam ke beberapa negara. Optimisme terbentuknya struktur pasar baru akan tercapai secepatnya,” tegas Mentan.

Terkait Toko Tani, Mentan meminta Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian agar secepatnya melakukan koordinasi bersama Direktur Teknis

Komoditas dan Badan Ketahanan Pangan untuk melakukan persiapan sarana pra sarana pembukaan TTI di seluruh Indonesia.

“Indikator TTI sudah terbukti positif hingga H -3 ketersediaan bahan pangan jelang Idul Fitri cukup dan yang sangat penting gejolak harga sangat stabil. Kita sudah sama-sama saksikan setiap pasar yang dikunjungi tidak ada gejolak harga juga ketersediaan bahan pangan cukup,” kata Mentan.



Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam sambutan Rapat Koordinasi Peningkatan Luas Tambah Tanam dan Serap Gabah di Semarang

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan saat datangnya musim paceklik yang biasanya terjadi selama tiga bulan. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah dengan meningkatkan luas tambah tanam dan serap gabah di Provinsi Jawa Tengah.

“Luas tambah tanam ini sangat penting mengingat ada bulan-bulan paceklik pada bulan Desember, Januari, dan Februari, setiap tahun. Yang menjadi permasalahan adalah karena tambah tanam di bulan Juli-September masih rendah,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam sambutan Rapat Koordinasi Peningkatan Luas Tambah Tanam dan Serap Gabah di Semarang (14/7).

Rapat Koordinasi Pangan lingkup Jawa Tengah yang diadakan Kementerian Pertanian bersama Pemprov Jawa Tengah dan dihadiri Gubernur Jateng, Kepala Staf Kodam IV Diponegoro, Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian sekaligus Koordinator UPSUS Jateng, Perwakilan Danrem, Dandim, Bakorluh, Bapeluh, serta para Kepala

Mentan Minta Tingkatkan Luas Tambah Tanam Untuk Atasi Produksi Musik Paceklik

“Target Pemerintah pada peningkatan luas tanam dan serapan gabah. Pemerintah memfokuskan pada tanaman padi untuk sektor pertanian, khususnya serap gabah dan tambah tanam. Hal tersebut bertujuan guna menambah peningkatan hasil produksi pangan dan menutupi kekurangan pangan pada musim paceklik”



Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten di Jateng, bertujuan untuk mengharmonisasi gerak langkah di setiap Propinsi dalam melaksanakan arahan Presiden. Mentan berharap rapat koordinasi tersebut bisa memberi solusi terhadap percepatan luas tambah tanam untuk meningkatkan harga pembelian pemerintah pada komersial gabah, sekaligus untuk menyerap hasil panen petani sebagai tambahan cadangan beras nasional.

Sesuai dengan arahan Presiden maka Rakor tersebut untuk membentuk harga yang layak di tingkat petani, pedagang dan konsumen. Rakor itu sebagai solusi percepatan luas tambah tanam (LTT) dengan harapan untuk meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) pada komersil gabah serta dapat menyerap hasil panen petani untuk menambah cadangan beras

Nasional. Selain itu, juga membahas pendampingan personel TNI AD di Jateng dalam mendukung program Upaya Khusus (UPSUS) untuk meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai (Pajale).

“Sekarang target Pemerintah pada peningkatan luas tanam dan serapan gabah. Saat ini Pemerintah tengah fokus pada tanaman padi untuk sektor pertanian, khususnya serap gabah dan tambah tanam. Hal ini bertujuan guna menambah peningkatan hasil produksi dan menutupi kekurangan pada musim paceklik nanti. Serap gabah dan tambah tanam menjadi fokus. Setiap tahun permasalahannya sederhana yaitu masih rendahnya tambah tanam di bulan Juli sampai September rendah. Padahal 3 bulan berikutnya dapat menjadi bulan



paceklik” kata Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa Pemerintah RI telah mengingatkan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia untuk menghadapi musim tanam padi pada Juli sampai September 2016 yang kerap disebut masa paceklik karena menurunnya curah hujan, namun fenomena La Nina mengakibatkan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia khususnya Jawa Tengah tetap tinggi seperti pada musim hujan sehingga harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan luas tambah tanam. Pemerintah sangat memperhatikan periode Juli sampai September yang dikenal sebagai masa paceklik untuk musim tanam padi, dan luas tambah tanam menjadi penting untuk mengantisipasi penurunan produksi pertanian khususnya padi.

“Kami meminta kepada Pemprov Jawa Tengah untuk tidak melewatkan begitu saja La Nina yang merupakan keberkahan bagi pertanian dalam meningkatkan produktivitas. Ada La Nina datang tolong jangan disia-siakan. Karena hujan ini datang sampai bulan Oktober. Tahun ini tidak ada musim kering khususnya Jawa. Ini hujan terus, kita optimalkan dan maksimalkan. Saya mengharapkan Gubernur Jawa Tengah memimpin seluruh kepala dinas di provinsinya untuk tidak menyalahgunakan fenomena La Nina, dengan meningkatnya curah hujan pada musim kemarau karena hujan datang sampai Oktober. Tahun ini tidak ada musim kering khususnya Jawa. Ini hujan terus, kita optimalkan dan maksimalkan,” terang Mentan

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Pertanian, Mentan menyebutkan bahwa target tanam padi di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode Juli hingga September 2016 mencapai 60.696 hektar,

dan realisasi pada April hingga Juni hanya mencapai 173.200 hektar. Dalam periode April-Juni 2016, realisasi luas tambah tanam padi di Kabupaten/kota Jateng yakni di Cilacap 48.583 ha (72,64%), Banyumas 28.479 ha (67,84%), Purbalingga 17.668 ha (60,34%), Banjarnegara 11.591 ha (80,96%), Kebumen 34.231 ha (99,27%), Purworejo 23.763 ha (80,97%), dan Wonosobo 8.885 ha (50,46%).

Sedangkan target luas tambah tanam padi Juli-September 2016 untuk Cilacap (3.742 ha, 2.639 ha, dan 11.919 ha), Banyumas (7.585 ha, 3.920 ha, dan 1.995 ha), Purbalingga (5.954 ha, 4.474 ha, dan 1.183 ha), Banjarnegara (1.182 ha, 1.254 ha, dan 290 ha), Kebumen (67 ha, 34 ha, dan 151 ha), Purworejo (2.900 ha, 2.292 ha, dan 394 ha), dan Wonosobo (3.470 ha, 3.181 ha, dan 2.070 ha). Kalau target luas tambah tanam dan penyerapan gabah sebanyak 1,2 juta ton dapat tercapai maka dapat dipastikan Indonesia tidak ada lagi impor dan tidak ada bulan paceklik

“Apabila pencapaian target luas tambah tanam hingga 1,2 juta hektar di Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai tahun 2016, yang diikuti serap gabah meningkat 1,13 juta ton gabah kering panen maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, guna mencapai hal itu irigasi harus juga akan diperbaiki, lalu traktor ditambah, kemudian sarana produksi akan dikawal bersama” kata Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan jajaran Komando Distrik Militer, sepakat menambah luas lahan tanam padi dengan strategi memanfaatkan musim kemarau basah

guna meningkatkan produktivitas padi.

“Kita akan menambah luas lahan tanam padi dengan memanfaatkan kondisi cuaca yang disebut La Nina dan semua kabupaten/kota diminta komitmennya untuk meneken kesepakatan bersama, sinergi antara Dinas Pertanian dan TNI ini merupakan modal besar dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan ketahanan pangan Jateng” kata Gubernur Jawa Tengah.

Gubernur Jawa Tengah menjelaskan bahwa luas tambah tanam padi di Jateng pada musim La Nina ini tercatat sebanyak 845 ribu hektare dan tersebar di 35 kabupaten/kota atau bertambah 128 ribu hektare dari luas sebelumnya. Dengan luas tanam itu diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi petani serta masyarakat Jateng maupun luar daerah.

Terkait dengan produksi kedelai, Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa budi daya kedelai bagi petani tidak menarik karena selain prosesnya rumit, harga jual komoditas bahan baku pembuatan tempe dan tahu itu juga lebih murah dari tanaman lain seperti jagung dan kacang hijau. Petani kedelai harus mendapat perhatian khusus, salah satunya dengan memberikan subsidi.

Di akhir Rakor, dilakukan penandatanganan MoU kesanggupan Dinas Pertanian Pemprov Jateng, Dinas Pertanian Kabupaten se-Jateng dan pihak TNI untuk melakukan peningkatan luas tambah tanam dan serap gabah petani. Pada bulan Oktober 2016, Pemprov Jateng menargetkan serap gabah petani sebanyak 1,13 juta ton gabah kering panen. Penyerapan ini naik sebanyak 70 persen dari realisasi serapan tahun lalu.





Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberi sambutan pada acara Halal Bi Halal di Aula Gedung F Kantor Pusat, Kementan, Jakarta

Lewat Momentum Acara Halal Bi Halal Mentan Apresiasi Kinerja PNS Kementan

"Mentan apresiasi kinerja PNS lingkup Kementan sekaligus meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Pertanian karena pegawai Kementan lebih banyak bekerja keras di lapangan dan mendatangi wilayah-wilayah pertanian di seluruh Indonesia dalam rangka kendalikan harga dan jaga stok pangan selama Ramadan dan Lebaran tahun 2016"

Dalam mewujudkan swasembada pangan, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian harus tetap bersemangat dan bekerja keras. Menteri Pertanian mangajak kepada semua pegawai Kementerian Pertanian agar jangan sampai lengah khususnya menghadapi titik kritis produksi di Juli, Agustus, dan September 2016.

"Jangan lengah. Gunakan momentum tiga bulan kedepan untuk bekerja keras karena diperkirakan musim paceklik pada Desember, Januari, Februari. Jadi jangan kita lengah di bulan Juli, Agustus, September. Bulan shortage ini produksi harus diisi," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat acara Halal Bi Halal di Aula Gedung F Kantor Pusat, Kementan, Jakarta, (12/07).

Dihadapan seluruh PNS Kementan, Mentan mengapresiasi kinerja pegawainya yang dinilai telah bekerja keras mengendalikan harga dan menjaga stok pangan selama Ramadan dan Lebaran tahun 2016.

"Saya sempat berdiskusi dengan Pak Presiden berdua, kami terima kasih atas hasil kinerja bapak-ibu. Kita lihat angka tetap produksi pangan cukup tinggi, tertinggi selama 10 tahun. Semua produksi naik. Ini kerja kita semua," ujar Mentan.

Mentan menyampaikan stok beras Indonesia sempat saat sekarang terdapat 2,1 juta ton di gudang Bulog dengan perhitungan stok tersebut dapat

dicadangkan untuk tujuh bulan ke depan. Mentan juga menyebut adanya hasil Angka Tetap (ATAP) tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) tentang peningkatan produksi, dan menurutnya hasil tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

"Peningkatan produksi, terkait laporan BPS beberapa hari yang lalu merupakan yang pertama dalam sejarah, ini adalah kerja keras bapak ibu sekalian, semoga bisa lebih ditingkatkan lagi," kata Mentan.

Lebih lanjut, Mentan mengungkapkan bahwa dalam enam bulan terakhir impor untuk komoditas jagung dapat turun sebanyak 47 %. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan nilai impor pada beberapa tahun terakhir yang hanya turun sebesar 2-4%.

"Adanya penurunan impor jagung ini merupakan prestasi yang membanggakan kita semua dan diharapkan pada tahun tahun kedepannya Indonesia sudah tidak lagi mengimpor jagung" ungkap Mentan.

Terkait daging, Mentan menargetkan bakal mencabut semua hal yang menghambat peredaran komoditas daging ke masyarakat sehingga warga juga dapat menikmati konsumsi daging dengan harga yang terjangkau. Target tersebut telah dilaporkan kepada Presiden.

"Kita harus kerja, kerja, kerja. Untuk daging kita targetkan dalam tiga bulan semua hal yg menghambat akan kita cabut. Beragam langkah yang bakal dilaksanakan dalam rangka mencapai target tersebut," kata Mentan.

Mentan mengemukakan, kesibukan yang dilakukan pada saat menjelang lebaran antara lain adalah guna menelusuri sejumlah sistem perairan atau irigasi yang mangkrak.

"Saya berharap agar berbagai proyek irigasi yang macet atau mangkrak tersebut telah dapat diatasi permasalahannya sehingga sudah bisa diselesaikan pada tahun ini"harap Mentan.

Dalam kesempatan tersebut, Mentan menyatakan permintaan maaf kepada keluarga besar Kementerian Pertanian. Sebab, selama ini pegawai Kementan lebih banyak bekerja di lapangan dan mendatangi wilayah-wilayah pertanian di seluruh Indonesia. Hal tersebut membuat waktu para pegawai untuk berkumpul dengan keluarga semakin berkurang.

"Saya minta maaf untuk yang bekerja pada hari libur. Kita pada H-1 juga masih di lapangan, Meski sering menghabiskan waktu di lapangan, justru para pegawai ini melakukan kegiatan yang patut diapresiasi karena pada H-1 Lebaran pun masih tetap bekerja dan terjun langsung memastikan pasokan pangan berjalan lancar." kata Mentan.

Sebagai bentuk permintaan maafnya, Mentan didampingi Sekretaris Jenderal Kementan serta seluruh pejabat eselon I, II, III dan seluruh pegawai Kementan langsung menyalami satu per satu pegawai Kementan yang telah membuat barisan.





Mentan Dapat Apresiasi Dari Presiden Mampu Atasi Harga Bawang dan Tekan Impor Jagung

"Selain berhasil dalam hal harga dan ekspor bawang, Kementerian Pertanian juga berhasil dalam menekan impor jagung yang turun 47% pada Januari-Mei 2016 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya"

Presiden RI mengapresiasi kinerja menteri-menteri pada Kabinetnya, termasuk Menteri Pertanian yang mampu membuat laju inflasi rendah di tahun 2016 yaitu bisa di bawah 4%. Presiden juga memuji Menteri Pertanian dalam menjalankan tugasnya dengan baik hingga turun ke desa-desa demi mengamankan harga pangan.

"Saat mau mengamankan harga bawang merah yang tinggi, dengan memasok bawang dari sentra-sentra bawang di Jawa, seperti Brebes dan Nganjuk, pak Mentan sampai menyediakan truk untuk membawa bawang itu ke Jakarta," kata Presiden Joko Widodo saat usai rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, (14/7).

Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Kepala Staf Kepresidenan dan Juru Bicara Presiden, Presiden mengingatkan Menteri Pertanian soal harga komoditas strategis terutama harga bawang merah, karena pemerintah memang menargetkan harga bawang bisa ke Rp. 25.000/kg.

Menanggapi pujian dari Presiden, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menjelaskan bahwa dirinya memang mencari bawang langsung dari sentra-sentra petani di Brebes dan Nganjuk, serta menyiapkan dana hingga Rp. 20 miliar untuk menalangi sementara pembelian bawang-bawang oleh Perum Bulog, karena khawatir Bulog terkendala birokrasi dalam menyiapkan anggaran pembelian bawang tersebut.

"Tapi dana tersebut akhirnya tidak terpakai, karena Bulog sudah siap dengan uangnya sendiri. Hasilnya, saat ini harga bawang turun ke Rp. 10.000 hingga Rp. 12.000/kg. Sekarang kita malah harus menyelamatkan harga bawang yang jatuh. Bulog kita perintahkan membeli bawang petani Rp. 15.000/kg, karena harga Rp. 15.000/kg petani sudah untung. Bawang ini bisa disimpan atau diekspor," jelas Mentan.

Mentan memaparkan, petani saat sekarang tidak meminta subsidi dari pemerintah seperti pupuk. Anggaran pertanian yang jumlahnya ratusan triliun



Mentan Andi Amran Sulaiman usai rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta

rupiah tidak ada manfaatnya bila programnya tidak diubah.

"Percuma bila petani diberikan bantuan pupuk lalu panen secara bersamaan, harga bisa jatuh. Yang baik itu adalah membeli hasil panen petani di atas HPP (harga pembelian pemerintah). Itu lebih bermanfaat bagi petani, dan impor akan hilang perlahan," papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa bagi petani, yang terpenting saat sekarang adalah harga bisa dibeli Rp. 15.000/kg secara terus menerus. Sehingga petani bisa terus semangat menanam bawang. Pada tahun 2016, Indonesia belum mengimpor bawang, bahkan dapat mengeksport bawang ke 5 negara di dunia.

"Rencana impor bawang merah yang tadinya akan dilakukan BUMN tetapi tidak direalisasikan. Tidak ada impor bawang merah hingga sekarang. Fokus untuk sekarang adalah ekspor bawang merah ke luar negeri. Diharapkan produksi bawang ini akan meningkat ke depan, tahun lalu ekspor naik 100%. Kita usahakan tingkatkan ekspor dari tahun lalu," jelas Mentan.

Selain keberhasilan dalam hal harga dan ekspor bawang, Mentan juga mengungkapkan soal keberhasilannya menekan impor jagung yang turun 47% pada Januari-Mei 2016 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk komoditas jagung, fokus pemerintah adalah menurunkan impor. Sampai dengan sekarang impor sudah

turun 47%, dan ditargetkan pada 2018 tidak ada lagi impor jagung.

"Sampai dengan hari ini impor jagung telah turun 47%. Ini sangat ekstrem penurunannya. Karena kita beri jaminan harga wajar ke petani, dan membuat petani bergairah menanam, kita jaga kondisi ini sampai akhir tahun. Kalau itu terjadi mudah-mudahan kita sudah tidak impor paling lambat 2018. Kita impor itu 3,6 juta ton tahun lalu, sekarang sampai Juli 800.000 ton, tahun lalu dalam periode yang sama 1,4 juta ton," ungkap Mentan.

Menurut Mentan, saat sekarang stok jagung nasional ada sebesar 120 ribu ton, di mana stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri. Besarnya impor jagung tahun lalu lebih dikarenakan pemerintah melalui Bulog membeli jagung tidak seperti sekarang.

Mentan juga mengungkapkan mengenai stok komoditas strategis selama tiga bulan ke depan, khususnya beras. Stok yang tersedia cukup untuk 8 bulan ke depan, sampai adanya panen raya tahun depan. Bulog masih diberdayakan untuk menyerap gabah dari petani.

"Sekarang kalau kita hitung stok ada 2 juta ton, cukup untuk delapan bulan ke depan. Artinya sampai Maret panen puncak. Ini sudah menyambung kan, dan masih ada waktu enam bulan untuk serap gabah. Artinya kita berdoa produksi membaik" ungkap Mentan.



Menteri Pertanian, Andi Amran memberikan sambutan pada acara panen raya jagung di Desa Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto

Mentan: “Jangan Import Jagung Kalau Petani Bisa Berproduksi”

“Meski import merupakan salah-satu solusi untuk menambal selisih angka target produksi dan kebutuhan jagung nasional, namun untuk kedepan import jagung sudah tidak diperlukan lagi. Jika para petani lebih produktif lagi, tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi pengekspor jagung. Jangan import kalau petani bisa berproduksi, Indonesia bahkan berpotensi menjadi pengekspor”

Kementerian Pertanian menargetkan, Indonesia akan mencapai swasembada jagung paling lambat tahun 2018, apalagi impor jagung dapat ditekan hingga turun 47% dari kebutuhan nasional, 10,7 juta ton. Jika kran impor akan ditutup maka semakin banyak pengusaha benih dan pakan ternak menjalin kemitraan dengan petani.

“Impor jagung kita turun, sampai hari ini 47% atau sekitar 800 ribu sampai satu juta ton. Kita targetkan tahun depan sudah tidak ada impor lagi. Paling lambat tahun 2018,” kata Menteri Pertanian, Amran usai acara panen raya jagung di Desa Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto (15/7).

Mentan mengungkapkan berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Balitbangtan), pada 2015 Indonesia mengimpor hampir 1,7 juta ton jagung. Adapun pada per Juni 2016, angka impor baru berada di kisaran 800.000 ton. Sementara target produksi jagung nasional pada 2016 adalah 21,35 juta ton, sedangkan kebutuhan jagung di Indonesia sekitar 23,4 juta ton per tahun. Jika para petani lebih produktif lagi, tidak tertutup kemungkinan untuk menjadi pengekspor jagung.

“Meski import merupakan salah-satu solusi untuk menambal selisih angka target produksi dan kebutuhan jagung nasional, namun untuk kedepan import jagung sudah tidak diperlukan lagi. Jangan import kalau petani bisa berproduksi, kita bahkan berpotensi menjadi pengekspor. Sejak awal Juni, impor jagung sudah mengalami penurunan hingga 50 persen, turun tiga angka dari yang sekarang 47 persen. Ini, karena produksi jagung lokal kita yang signifikan. Tidak perlu lah... kita ambil dari Amerika dan Argentina, kalau petani kita sudah mampu memenuhinya”, ungkap Mentan.

Menurut Mentan, kebutuhan jagung secara nasional mencapai 10,7 juta ton/tahun sehingga tahun lalu Indonesia



masih harus mengimpor sebanyak 3,6 juta ton. Artinya, jika sudah ditekan sampai 0,8-1 juta ton, maka kebutuhan impor jagung tahun 2016 berada di kisaran 2,6-2,8 juta ton. Jumlah total impor jagung hingga bulan Juni 2016 telah turun drastis sebesar 47 persen, dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Dalam dua tahun ke depan, Indonesia diharapkan tak lagi impor jagung,

“Untuk mencukupi kebutuhan jagung baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pakan ternak. Caranya cukup sederhana. Kami meminta para pengusaha benih dan pakan ternak agar menjalin kemitraan dengan para petani jagung. Pemerintah support regulasi, kalau cukup dalam negeri kami tutup impor. Harga kami jamin. Kami garansi kalau ada harga di bawah Rp. 2.750, Bulog langsung beli. Itu perintah, bukan imbauan. Itu sudah Perpres, harga jagung kering Rp 3.150,” ujar Mentan.

Mentan juga menjelaskan, jika Pemerintah telah menjalankan program Integritas Tanaman Kelapa Sawit dan Jagung dengan tujuan dapat membantu pendapatan petani. Program itu dijalankan, ketika umur kelapa sawit di bawah tiga tahun. Adapun peremajaan tanaman kelapa sawit yang berumur 25 tahun ke atas, adalah merupakan kesempatan untuk melaksanakan pola tanam tumpang sari dengan tanaman pangan atau tanaman semusim.

“Program Pemerintah yang kini sedang berjalan dalam rangka meningkatkan produksi jagung nasional melalui sistem penanaman jagung dengan tanaman lain adalah program Intergritas Tanaman Kelapa Sawit - Jagung. Saat kelapa sawit umur dibawah 35 tahun, maka diantaranya bisa ditanami jagung. Artinya, petani bisa memperoleh penghasilan tambahan sebelum tanaman kelapa sawit menghasilkan buah”, jelas Mentan.

Disela acara kegiatan dilakukan penanda-tanganan kesepakatan atau MoU (Moment of Understanding) antara 3 perwakilan dari 18 Kelompok Tani (Poktan) di Provinsi Jawa Timur. Yakni Poktan Kabupaten Mojokerto, Poktan Kediri dan Poktan Pasuruan dengan PT. Charoen Pokphand. Dilanjutkan dengan acara memanen jagung hasil kemitraan PT. Bisi dengan Kelompok Tani Lengkon. Mentan pun ikut turun memanen jagung hasil kemitraan antara Poktan setempat dengan PT. Charoen Pokphand.

“Kemitraan seperti yang dilakukan PT BISI dan PT Charoen Pokphand Indonesia (CPI) itulah yang kami maksudkan. Sebagai produsen benih jagung hibrida, PT BISI menjalin kemitraan dengan para petani dengan cara memberi pinjaman benih dan melakukan pembinaan. Tahun ini pola kemitraan itu akan menyentuh 100.000 hektar lahan petani. Pola ini sangat bagus, PT CPI sudah membeli jagung



petani Rp.3.450. Inilah yang kami dambakan. Kalau ada 10 pengusaha seperti ini, akan mencapai 1 juta hektar. Kalau 1 juta hektar enggak lagi impor," ujar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menerangkan bahwa saat sekarang Kementan membangun sistem supaya petani sejahtera, pengusaha untung dan konsumen tersenyum. Pemerintah sangat mendukung adanya program kemitraan ini salah satunya adanya bantuan program kemitraan sebesar 100 ribu hektar yang tersebar di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu Presiden Direktur PT BISI Internasional Jemmy Eka Putra menjelaskan tahun 2016 pihaknya menargetkan kemitraan dengan petani mencapai 100 ribu hektar. Tersebar di lima provinsi utama penghasil jagung. Antara lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung dan Sumatera Utara.

"Hingga saat ini, target itu telah tercapai 30 ribu hektar. Salah satunya di Kabupaten Mojokerto seluas 5 ribu hektar. Petani kami beri pinjaman benih jagung dibayar pasca panen. Kita melakukan pembinaan cara tanam yang baik, manajemen saat penanaman, dan pasca panen agar jangan sampai jagung

jamuran," jelas Presiden Direktur PT BISI Internasional.

Presiden Direktur PT CPI, Thomas Edfendy juga menuturkan jika target kemitraan petani dengan PT BISI tahun ini tercapai 100 ribu hektar, maka jagung yang dihasilkan diprediksi mencapai 800 ribu ton. kondisi itu masih dibawah kebutuhan perusahaanya dan tak ada masalah untuk membeli itu.

Kami komitmen membeli hasil panen petani dengan harga pasar. Kalau harga pasar di bawah harga referensi pemerintah Rp3.150, maka kami akan beli sesuai harga referensi pemerintah," kata Presiden Direktur PT CPI.



Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberi sambutan pada rapat koordinasi pangan di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya, Surabaya

Pemprov Jawa Timur Optimis Capai Target Luas Tambah Tanam

"LTT Padi di Jawa Timur periode tanam Oktober 2015-Maret 2016 telah mencapai 1.438.434 Ha atau meningkat 1,94% dari periode sebelumnya. LTT Padi secara kumulatif keseluruhan sampai dengan pertengahan Juli 2016 telah mencapai 2.064.887 Ha. Dengan capaian tersebut, Propinsi Jawa Timur dapat optimis bahwa target LTT sebesar 2.283.304 Ha akan dapat tercapai pada tahun 2016"

Sesuai dengan arahan Presiden RI, bahwa pemerintah dalam tiga bulan ke depan akan memfokuskan pada penanganan dua program yakni pengampunan pajak dan pangan. Untuk pangan Kementerian Pertanian secara khusus

menangani Luas Tambah Tanam (LTT) dan Serapan Gabah Petani (SERGAP) demikian yang dikatakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat rapat koordinasi pangan dalam rangka peningkatan luas tambah tanam (LTT) padi dan serapan gabah petani (SERGAP) Tahun 2016 di Balai Prajurit Kodam V Brawijaya, Surabaya, (15/7).

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, Irdam Kodam V Brawijaya, Kepala BULOG Jatim, Kadivreg BULOG se-Jawa Timur, anggota DPR RI dari Komisi IV, anggota DPD serta penanggung jawab kepentingan lainnya dilakukan penandatanganan kesepakatan/MoU Luas Tambah Tanam di Propinsi Jawa Timur

dan Serapan Gabah Petani oleh BULOG Jatim.

Menurut Mentan, LTT Padi di Jawa Timur periode tanam Oktober 2015-Maret 2016 telah mencapai 1.438.434 Ha atau meningkat 1,94% dari periode sebelumnya. Saat sekarang LTT Padi secara kumulatif keseluruhan sampai dengan pertengahan Juli 2016 telah mencapai 2.064.887 Ha. Dengan capaian tersebut, Propinsi Jawa Timur dapat optimis bahwa target LTT sebesar 2.283.304 Ha akan dapat tercapai pada tahun 2016. Hal itu juga didukung upaya optimalisasi serapan gabah petani oleh BULOG se-Jawa Timur sampai dengan pertengahan Juli ini telah terserap gabah sebanyak 47,78% yaitu 406.124 ton dari target sebesar 850.000 ton.

"Secara nasional, produksi pertanian Jatim terus meningkat. Saat ini di Ngimbang, Kabupaten Lamongan sedang dikembangkan Pabrik Gula Kebun Tebu Mas yang sudah beroperasi dengan bermitra dengan 1.400 petani dengan luas 16.000 hektar. Pabrik ini sendiri rencananya akan diresmikan pada Agustus 2016, sementara untuk soal irigasi atau pengairan, kami berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk membantu pembangunan infrastruktur waduk dan wilayah sungai di Jatim. Kami yakin, untuk Jatim sendiri di bawah pimpinan Pakde Karwo sebagai Gubernur Jatim, hasil pertanian terus meningkat, dan kami tidak ragukan hasilnya," ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan rasa optimistis terhadap produksi padi akan mengalami peningkatan, meski saat sekarang sedang musim La Nina yaitu fenomena perubahan iklim kemarau basah.

"Saya yakin ada peningkatan terutama di Jatim sebagai daerah penghasil padi. Kalau untuk komoditi lain misalnya jagung yang cocok untuk lahan kering bisa dialihkan ke NTB dan NTT," ungkap Mentan.

Mentan menyebutkan jumlah padi yang berhasil diserap Perum Bulog hingga 4 Juli sudah mencapai 1,81 juta ton atau 46,44 persen dari target 2016. Jumlah stok itu, masih mampu mencukupi kebutuhan lebih dari tujuh bulan atau hingga Maret 2017. Sedangkan untuk daerah yang produktif penghasil padi, Jatim menduduki posisi teratas sebagai daerah paling produktif penghasil padi.

"Serapan Bulog Jatim saat ini sudah mencapai 406.124 ton. Pada tahun 2015 serapan beras Bulog Jatim juga menjadi yang tertinggi nasional mencapai 800 ribu ton. Sedangkan target tahun 2016 yang diubah menjadi 1 juta ton yakin bisa tercapai dengan waktu panen yang masih tersisa lebih dari lima bulan ke depan," kata Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyampaikan, perkembangan LTT Padi di Jatim pada musim kemarau 2016 yaitu periode bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016 secara kumulatif mencapai 626.453 hektar atau baru mencapai 92,73 persen. Sedangkan kinerja tahun 2016, khususnya LTT padi pada musim penghujan 2015/2016 yaitu periode bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016 secara kumulatif mencapai 1.438.434 hektar atau meningkat 1,94 persen pada kondisi yang sama musim tanam tahun 2014 dan 2015.

"Secara keseluruhan dalam musim tanam tahun 2016 ini perkembangan sementara luas tanam keadaan sampai dengan 13 Juli 2016 mencapai 2.064.887 hektar. Musim hujan seperti ini, dapat memberikan suatu keuntungan tersendiri bagi petani padi. Hasil ramalan BMKG musim kemarau tahun 2016 bersifat kemarau basah, dengan curah hujan di sebagian besar daerah di atas normal. Kondisi ini dapat memberikan peluang bagi kita untuk peningkatan luas tanam pada Musim Tanam 2016," kata Gubernur Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur menambahkan sasaran LTT yang telah disepakati di tingkat nasional pada tanggal 30 Desember 2015 yaitu mencapai 2.282.304 hektar, sehingga kekurangan luas tambah tanam mencapai 217.417 hektar, dan optimalisasi serapan gabah dan beras oleh jajaran Bulog Divisi Regional Jawa Timur yang dialokasikan sebesar 850.000 ton, pada keadaan sampai dengan 12 Juli 2016 telah terserap sebesar 406.124 atau mencapai 47,78 persen.

"Untuk meningkatkan indeks pertanaman di Jatim, saat ini Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi lahan dan air di Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, Pemprov juga sedang menyelesaikan tahap pembangunan beberapa waduk di Jatim, diantaranya Waduk Gongseng di Bojonegoro, Waduk Bendo di Ponorogo, Waduk Tugu di Trenggalek, Waduk Bajulmati di Banyuwangi, dan Jabung Ring Dyke di Lamongan," jelas Gubernur Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur menuturkan berdasarkan data, saat sekarang luas baku sawah beririgasi di Jatim sebesar 934.376 Hektar, sedangkan di Jatim sendiri terdapat tujuh wilayah sungai dan 530 waduk, embung dan rawu. Ketersediaan air di Jawa Timur sebesar 19,3 miliar kubik dan kebutuhan air sebesar 22,2 miliar kubik, sehingga saat sekarang Jawa Timur defisit neraca air sebesar 2,9 miliar kubik.

"Kami meminta pemerintah untuk mengatasi masalah irigasi atau pengairan di Jatim, mengingat manajemen pengairan dalam pertanian sangat penting. Misalkan Sungai Bengawan Solo dibenahi, tentunya wilayah-wilayah di sekitarnya yang mengalami masalah kekeringan seperti Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Lamongan hingga Gresik akan terkena dampaknya dan hasil pertanian akan meningkat," kata Gubernur Jawa Timur.





Kejar Target 1 Juta Ha LTT Padi Kementan Kunjungi Tiap Provinsi

"Tiga bulan berturut turut yaitu Juli, Agustus, September menjadi critical point. Oleh karena itu pihak Kementerian Pertanian harus keliling ke setiap provinsi untuk melakukan pengawalan untuk mengejar target satu juta hektar luas tambah tanam padi"

Sebagai solusi percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) dalam mendukung peningkatan produksi dan menyerap hasil panen petani untuk menambah cadangan beras nasional, Kementerian Pertanian bersama Pemprov Banten mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan lingkup Provinsi Banten. Rakor tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan serupa yang juga telah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) didampingi Gubernur Banten, Wakil Asisten Teritorial TNI AD, Ketua DPRD serta Bupati dan Walikota dan jajaran Muspida/Muspika, TNI dan Bulog di Pendopo Gurbenuran Banten, Serang

"Saat ini tiga bulan berturut turut yaitu Juli, Agustus, September menjadi critical point. Oleh karena itu kami harus keliling tiap provinsi untuk melakukan pengawalan untuk mengejar target satu juta hektar luas tambah tanam padi," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman ketika memberikan sambutannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan lingkup Provinsi Banten di Pendopo Gurbenuran Banten, Serang, (19/07).

Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, Mentan mengetahui baku lahan sawah pada tahun 2015 seluas 201.566 ha, terdiri dari lahan sawah irigasi 104.030 ha (51,61%), lahan sawah non irigasi 97.537 ha (48,39%), dan lahan ladang (huma) 76.660 ha. BPS Provinsi Banten juga mencatat, berdasarkan Angka Ramalan I Tahun 2016, dengan perkiraan jumlah penduduk Banten sebesar 11.955.243 jiwa dan konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 104,17 kg maka produksi beras tahun 2016 surplus sebesar 47.063 ton.

Tahun 2016, target produksi padi Banten sebesar 2.355.070 ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung 38.489 ton pipilan kering, dan kedelai 12.830 ton. Sementara itu, berdasarkan Angka Ramalan I BPS Provinsi Banten, produksi padi sebesar 2.222.217 ton GKG, jagung 12.995 ton pipilan kering, dan kedelai 7.841 ton biji kering. Untuk itu Mentan meminta Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Provinsi Banten, untuk menambah luas tanam di provinsi tersebut sebesar tiga ribu hektar.

Harapannya, produksi padi dapat tetap terjaga terutama di bulan shortage.

Dalam Rakor yang dihadiri oleh Gubernur Banten, Wakil Asisten Teritorial TNI AD, Ketua DPRD Provinsi Banten, serta Bupati dan Walikota dan jajaran Muspida/Muspika Provinsi Banten, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang peningkatan luas tambah tanam dan serap gabah petani oleh Dinas Pertanian Pemprov Banten, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, TNI dan Bulog.

Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian kabupaten/kota menyanggupi penambahan luas tanaman padi untuk tiga bulan ke depan seluas 61.038 Hektare di enam kabupaten/kota. Enam kabupaten/kota tersebut antara lain Kabupaten Serang dengan luas tambah tanam padi 16.733 Ha, Kabupaten Pandeglang 22.319 Ha, Kabupaten Lebak 8.151 Ha, Kabupaten Tangerang 9.822 Ha, Kota Cilegon 55 Ha, dan Kota Serang 3.898 Ha. Penambahan luas tanam tersebut tertuang dalam penandatanganan kesanggupan dari enam kabupaten/kota yang disaksikan Menteri Pertanian dan Gubernur Banten.

Usai menghadiri Rakor, Mentan melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau secara langsung Gerakan Pengolahan Lahan Serempak Untuk Percepatan dan Penambahan Luas Tanam di Kecamatan Tanara, Kabupaten

Serang, Banten. Kegiatan itu merupakan bagian dari upaya khusus (upsus) Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan produksi untuk mencapai swasembada pangan. Kementan memberikan tambahan bantuan pompa air 10 unit, traktor 5 unit, dan bantuan untuk peningkatan produksi jagung pada luas tanam 5.000 ha.

"Dalam 3 bulan ini yaitu Juli hingga September, Banten akan difokuskan pada peningkatan luas tambah tanam dan serap gabah petani. Maka dari itu, Kementan akan terus pantau daerah-daerah yang sanggup melaksanakan luas tambah tanam di wilayah Banten. "Kegiatan ini jangan hanya ceremony, kalau bisa diselesaikan dengan cepat. Banten itu penopang Jakarta, seharusnya petani Banten lebih sejahtera. Kami yakin dibawah kepemimpinan Pak Gubernur sekarang pasti ini bisa kita lakukan," ucap Mentan.

Mentan berharap adanya pertemuan tersebut bisa memberi solusi terhadap percepatan luas tambah tanam untuk meningkatkan harga pembelian pemerintah pada komersial gabah, sekaligus untuk menyerap hasil panen petani sebagai tambahan cadangan beras nasional.

"Sedangkan untuk menghidupkan kembali lahan pertanian yang mati dan tidak digunakan oleh masyarakat, maka akan dibangun dum atau bendungan kecil dan sumur-sumur kecil untuk



mengairi lahan pertanian. Sehingga kekeringan saat musim kemarau dapat teratasi"harap Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten mengatakan kondisi sektor pertanian di Banten masih memerlukan berbagai sentuhan perbaikan, baik aspek teknologi maupun dari aspek peningkatan pengembangan usaha petani dan kelembagaannya.

"Perkiraan jumlah penduduk Banten yang mencapai 11 juta jiwa dan konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 104,17 kg, dapat diperoleh surplus beras tahun ini sebesar 47,063 ton," kata Gubernur Banten.



Kementan Jadikan Jawa Barat Sebagai Penopang Utama Pangan

"Jawa Barat berpotensi menjadi penopang pangan untuk Jakarta, bersama Banten dan Lampung. Dari ketiga daerah tersebut potensi yang paling kuat adalah Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki produksi yang melimpah. Ongkos distribusi pun murah karena dekat dengan Jakarta dibandingkan propinsi lain"

Kementerian Pertanian menetapkan tiga provinsi yang akan menjadi daerah segitiga penopang kebutuhan pangan DKI Jakarta yaitu Jawa Barat, Banten dan Lampung. Khusus Propinsi Jawa Barat dijadikan penopang utama kebutuhan pangan untuk warga DKI Jakarta, dengan alasan daerah tersebut adalah provinsi yang paling dekat dengan DKI Jakarta. Jabar lebih unggul, dalam hal transportasi yang jelas lebih murah, begitu juga produksinya yang lebih baik

"Jabar berpotensi jadi penopang pangan untuk Jakarta, bersama Banten dan Lampung. Dari ketiga daerah ini potensi yang paling kuat adalah Jabar. Provinsi Jawa Barat memiliki produksi yang melimpah. Ongkos distribusi pun murah karena dekat dengan Jakarta dibandingkan propinsi lain" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat pencahangan percepatan tanam padi dan program Luas Tambah Tanam (LTT) di Desa Jatisari, Kutawaringin, Kabupaten Bandung, (20/7).

Sebagai salah satu yang bisa dilakukan dalam menyejahterakan petani, Mentan

memberikan bantuan kepada para kelompok tani berupa bibit padi unggulan, pupuk, obat anti hama, traktor dan berbagai alat mekanis guna memudahkan para petani mengolah lahan persawahannya.

"Untuk meningkatkan produktivitas petani dengan berbagai bantuan. Produktivitasnya harus ditingkatkan, untuk produktivitas petani harus menggunakan teknologi. Pupuk subsidi juga sudah diberikan," kata Mentan.

Mentan menerangkan menjadikan



Mentan, Andi Amran Sulaiman saat memberikan bantuan kepada para kelompok tani di Desa Jatisari, Kutawaringin, Kabupaten Bandung

Indonesia sebagai negara yang berdaulat pangan merupakan cita-cita besar dari Pemerintah Indonesia. Perluasan luas tambahan tanam itulah yang menjadi upaya dari Kementerian Pertanian.

"Biasanya setiap Desember-Januari terjadi paceklik dan terjadi sepanjang tahun sampai 2015. Hal itu tentunya harus diubah. Ada gaya baru, kalau ini tercapai tidak ada paceklik karena kita atasi masa paceklik. Kami yakin, bisa pasti bisa," terang Mentan.

Mentan menegaskan pencanangan percepatan tanam dan program Luas Tambah Tanam (LTT) adalah sebagai upaya mendukung ketahanan pangan untuk mensejahterakan petani. Karena semakin sering petani menanam, maka akan sering panen, dan produksi Gabah Kering Panen (GKP) juga akan meningkat. Target Luas Tambah Tanam di Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2016 sebesar 2,18 juta ha.

"Upaya untuk meningkatkan produktivitas padi ini antara lain, dengan peningkatan Luas Lahan Tanam (LTT) Jabar, untuk periode April-September 2016, yakni sebesar 962.625 hektar. Dengan realisasi LTT hingga Juli 2016 ini tercapai 668.286 ha atau sama dengan 69,42%. Didukung jaringan irigasi dari Waduk Jatigede, Jawa Barat menargetkan dapat menyerap gabah kering panen sebanyak 1,2 juta ton" tegas Mentan.

Mentan berkomitmen menjadikan wilayah Jawa Barat sebagai salah satu lumbung padi nasional yang mampu memproduksi Gabah Kering Giling (GKG) setara 1,2 juta ton. Meskipun terkena imbas El Nino pada tahun 2015, berdasarkan data BPS Jawa Barat masih mampu menjadi unggulan kedua setelah Jawa Timur dalam produksi padi. Dengan adanya La Nina atau kemarau basah, diperkirakan Jawa Barat dapat meningkatkan produksi padi mengungguli Jawa Timur.

"Ketahanan pangan adalah di atas segalanya. Untuk itu para petani di Jawa Barat khususnya agar segera melakukan percepatan tanam padi. Karena sesuai dengan prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika pada tahun 2016 Indonesia mengalami musim kemarau basah. Kondisi ini mendukung untuk peningkatan produksi padi. Para petani tidak perlu khawatir padi yang ditanam tersebut akan mengalami kekeringan seperti tahun lalu" ucap Mentan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Mentan memaparkan rata-rata produktivitas padi Jabar selama tiga tahun terakhir terus meningkat. Produktivitas padi sawah pada Januari-Juni 2016 mencapai 63,43 kwintal per hektar. Sedangkan pada 2015 yakni 62,09 kwintal per ha dan pada 2014 yakni 59,76 kwintal per ha.

"Peningkatan produksi ini disebabkan oleh penerapan teknologi Jajar Legowo yang makin luas di Jabar. Lalu diperkuat dengan perbaikan jaringan irigasi dan penerapan alat mesin pertanian (alsintan) pra dan pasca panen yang intensif. Tak hanya itu saja, peningkatan ini juga disebabkan oleh petani yang makin yakin menggunakan benih varietas unggul," papar Mentan.

Untuk mengatasi masalah lahan terkait banyaknya alih fungsi lahan pertanian, Mentan menyebutkan pihak Kementerian Pertanian menyiasati keterbatasan luas lahan semakin sempit antara lain, meningkatkan LTT seperti yang disasar di Provinsi Jawa Barat ini dengan target LTT seluas 2,18 juta Ha dan dengan program peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menjadi 3 kali.

"Strategi dilakukan untuk program peningkatan IP, adalah mengoptimalkan ketersediaan air sebagai sumber irigasi tani di waduk Jatigede, dengan harapan beberapa wilayah di Kabupaten Majalengka, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Karawang dan Subang

mendapatkan dampak positif sehingga dalam setahun bisa tiga kali tanam padi," urai Mentan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Penanggungjawab Tim Upaya Khusus (Upsus) Provinsi Jabar yang juga Kepala Badan Karantina Pertanian, Banun Harpini mengatakan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Propinsi Jawa Barat menargetkan luas tanam selama periode Oktober 2015-Maret 2016 dan April-September 2016 sebesar 2,1 juta hektar (ha). Jumlah tersebut jauh lebih luas dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk mencapai target tersebut akan dioptimalkan pemanfaatan lahan kering.

"Target awal luas tanam di Jawa Barat sebesar 2,040 juta ha. Namun hasil Rapat Koordinasi (Rakor) di Kementerian Pertanian (Kementan) ada tambahan luas tanam sekitar 81 ribu ha selama periode Juli-September. Kita distribusikan target tambah tanam tersebut ke 11 kabupaten, ternyata masih memungkinkan untuk penambahan luasan dengan pemanfaatan lahan kering. Kita juga berusaha meningkatkan indeks pertanaman menjadi 300, terutama di wilayah Pantura," kata Kabarantan.

Kabarantan menerangkan sesuai dengan perencanaan, target luas tanam di Jawa Barat pada periode April - September (ASEP) 2016 sebesar 962.625 ha. Realisasi sampai Juli 2016 (per 18 Juli 2016) sebesar 668.286 ha atau sekitar 69,42%. Untuk bisa mencapai target luas tanam tersebut, pada Juli ini akan didorong tambahan sekitar 187 ribu ha. Pada Agustus diharapkan ada tambahan tanam seluas 90 ribu ha, September 66 ribu ha.

Kabarantan mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi padi. Salah satunya luas lahan yang semakin sempit. Karena itu strategi Kementan untuk menyiasati keterbatasan lahan akibat alih fungsi lahan adalah peningkatan indeks

pertanaman (IP) menjadi tiga kali.

"Diharapkan beberapa wilayah di Majalengka, Sumedang, Indramayu, Cirebon, Karawang dan Subang dapat

tiga kali tanam padi selama setahun atau IP 300. Saat ini rata-rata IP di Jawa Barat hanya 230. Bahkan petani di Teluk Jambe, Karawang IP-nya mencapai 400. Upaya lainnya yang kita lakukan adalah

penambahan luasan tanam dengan pemanfaatan lahan kering," ujar Kabarantan.



Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada acara Peningkatan Luas Tambah Tanam Padi di Narumonda, Toba Samosir, Sumatra Utara

Indonesia Harus Keluar Dari Ketergantungan Impor Pangan

"Indonesia dapat keluar dari ketergantungan pada impor asal dapat mendorong produksi pangan dari dalam negeri. untuk dapat mencapai target tersebut, Pemerintah sudah menargetkan luas tanam yang dapat mencapai 15 juta hektare dan luas panen sebesar 14,8 juta hektare. Penerapan teknologi pertanian modern harus dilakukan agar para petani bisa meningkatkan hasil produksinya"

Pemerintah Indonesia akan terus melakukan upaya untuk keluar dari ketergantungan pada pasok bahan pangan impor dengan mendorong produksi dari dalam negeri seperti beras, jagung dan kedelai. Selain produksi, target untuk lebih membenahi kesejahteraan petani juga dipancarkan. Untuk itu Pemerintah melakukan percepatan penambahan luas areal panen dan percepatan tanam. Kementerian Pertanian mengawali kegiatan itu melalui Gerakan Percepatan Tanam.

"Indonesia dapat keluar dari ketergantungan pada impor asal dapat mendorong produksi pangan dari dalam negeri. Kementan telah menetapkan produksi Padi sebanyak 75,13 juta ton gabah kering giling (GKG). Kemudian jagung 21,35 juta ton dan kedelai 1,6 juta ton. Dengan anggaran Rp31,51 triliun, target-target produksi diharapkan dapat tercapai," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada acara Peningkatan Luas Tambah Tanam Padi di Narumonda, Toba



Samosir, Sumatra Utara (23/7).

Menurut Mentan, untuk dapat mencapai target tersebut, Pemerintah sudah menargetkan luas tanam diharapkan dapat mencapai 15 juta hektare dan luas panen sebesar 14,8 juta hektare. Kondisi terakhir, pada Oktober, luas panen sempat turun 190.000 hektare dari tahun sebelumnya akibat kekeringan.

Dalam acara yang dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Bupati Toba Samosir, Mentan menyerahkan bantuan berupa

alat pertanian modern dari pemerintah pusat ke empat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yakni Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Kumbang dan Kabupaten Tapanuli Utara. Sebanyak 6 unit traktor roda empat, 10 unit pompa air, 10 unit transplanter dan mini 45 unit traktor roda dua diberikan oleh pemerintah untuk menunjang sektor pertanian di empat kabupaten yang terletak di sekitar Danau Toba.

"Hari ini atas nama pemerintah saya

memberikan alat pertanian untuk masyarakat. Pemerintah ingin mendorong peningkatan hasil pertanian di Sumatera Utara agar harga kebutuhan pangan bisa terjangkau. Kami berharap masyarakat di kawasan sekitar Danau Toba mampu meningkatkan kesejahteraan melalui swasembada pangan. Para petani di daerah saat ini harus mengenal mekanisme pengolahan secara modern agar sektor pertanian di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Sektor pertanian Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain,” kata Mentan.

Mentan menegaskan bahwa saat sekarang penerapan teknologi pertanian modern harus dilakukan agar para petani bisa meningkatkan hasil produksinya. Untuk itu Pemerintah akan berupaya mengedukasi petani di seluruh daerah agar mengenal teknologi pengolahan lahan.

“Tanpa teknologi mustahil petani bisa bersaing untuk meningkatkan indeks pertanian. Kemajuan teknologi terbukti mampu menurunkan biaya produksi 40 persen. Artinya Rp 9 triliun bisa dinikmati petani karena ada teknologi,” tegas Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa

para petani di daerah saat sekarang harus mengenal mekanisme pengolahan secara modern agar sektor pertanian di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Selain itu, dengan adanya penerapan teknologi modern, akan semakin banyak generasi muda yang memilih sektor pertanian sebagai mata pencahariannya.

“Tanpa teknologi mustahil pertanian Indonesia bisa bersaing. Sementara banyak anak muda sekarang yang tidak mau turun ke sawah. Saya harap dengan penerapan teknologi modern. Sektor pertanian semakin maju, saya berharap masyarakat di kawasan sekitar Danau Toba mampu meningkatkan kesejahteraan melalui swasembada pangan,” jelas Mentan.

Pada kesempatan yang sama Bupati Toba Samosir Darwin Siagian mengatakan bahwa mayoritas masyarakat di sekitar Danau Toba mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian. Selama ini, masyarakat mengolah sawahnya dengan cara-cara tradisional. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat bisa meningkatkan produksinya.

“Masyarakat di sekitar Danau Toba

memang sebagian besar adalah petani tradisional. Dengan adanya bantuan dari pusat, saya harap masyarakat bisa memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan produksinya,” kata Bupati Toba Samosir.

Kepala Dinas Pertanian Peternakan, Perikanan Kabupaten Tobasa Joni Hutajulu mengharapkan melalui dialog antara Mentan dengan para petani diharapkan penyelesaian kendala-kendala yang dialami dan nantinya ada solusi atas kendala-kendala itu. Dalam rangka pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Tobasa, para petani sangat penting memahami sistem pertanian modern, serta mampu menggunakan peralatan modern.

“Saat ini, selain traktor, kita telah mendapat bantuan mesin taman, dan juga mesin panen. Dengan menggunakan peralatan modern ini, sangat membantu petani baik dari sisi tenaga, waktu, dan biaya.

Jika peralatan modern ini kita gunakan dengan baik, maka produksi panen kita akan meningkat, dan pada akhirnya akan menambah kesejahteraan para petani di daerah kita ini,” kata Kepala Dinas Pertanian Peternakan, Perikanan Kabupaten Tobasa.



Mentan, Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan Provinsi Sumut di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumut

Mentan: “Harus Ada Sinergisitas Agar Pertanian Bisa Maju”

“Tingkat perkembangan pertanian padi di Sumut di bawah peringkat dari Sumsel. Seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pertanian padi dan pertanian di Sumut, harus ada getaran dari sinergisitas agar pertanian bisa lebih maju. Dengan adanya sinergisitas upaya peningkatan pertanian padi, maka Sumut dapat bersaing dengan Sumsel”

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi luar biasa dalam bidang pengembangan produk pertanian karena didukung oleh ketersediaan lahan yang mencukupi dan kesuburan tanah serta aspek lainnya. Oleh karena itu Kementerian Pertanian meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap mendukung swasembada pangan nasional yang ditargetkan Presiden RI.

“Sumut harus bisa kembali menjadi produsen padi peringkat kelima atau bahkan keempat terbesar nasional. Kalau LTT ini dilaksanakan Kami yakin Sumut akan kembali ke posisi tersebut” kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman

dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan Provinsi Sumut di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumut (25/7).

Dalam Rapat Koordinasi Pangan Provinsi Sumut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Kesanggupan Luas Tambah Tanam (LTT) dan Kesanggupan Capaian Serapan Gabah antara Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan Kodim seSumut, Perjanjian kesepakatan untuk kesanggupan luas tambah tanam dilakukan antara Kodim 0203/LKT Langkat dengan kabupaten Langkat dan Kota Binjai, selain itu juga penandatanganan kesepakatan perjanjian kesanggupan luas tambah tanam antara Kodim 0209/LB dengan Pemprov Sumut, Pemkab Labuhan Batu, Labuhanbatu Utara (Labura) dan Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel). Begitu

juga perjanjian kesanggupan pencapaian serapan gabah (sergab) antara Kepala Sub Divre I Bulog dengan Kodim 0203/LKT dan Kodim 0209/LB.

Berdasarkan pantauan langsung perkembangan sawah-sawah yang sedang ditanami padi di berbagai kawasan Sumatera Utara, Mentan menilai tingkat perkembangan pertanian padi di Sumatera Utara di bawah peringkat dari Sumatera Selatan. Dengan demikian, Sumut harus dapat kembali menempati urutan lima besar nasional sebagai provinsi penghasil produksi pertanian.

“Pertanian di Sumatera Utara saat ini di bawah Sumatera Selatan. Sumatera Utara berada di peringkat enam, sementara Sumatera Selatan berada

satu tingkat, yaitu peringkat lima. Kami menghimbau Pemerintah Provinsi Sumut untuk mengejar target produksi pertanian padi, jagung dan kedelai (Pajale) di tahun 2016" ujar Mentan.

Mentan juga menyampaikan motivasinya kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pertanian padi dan pertanian di Sumut, harus ada getaran dari sinergisitas agar pertanian bisa lebih maju. Dengan adanya sinergisitas upaya peningkatan pertanian padi, maka Sumut dapat bersaing dengan Sumatera Selatan.

"Sumut harus lebih bisa berkembang lagi, dan semua pihak yang bertanggung jawab harus lebih bersinergisitas untuk meningkatkan pertanian ini. Saya yakin Sumut bisa meningkatkan pertaniannya dan bisa mengungguli pertanian di Sumatera Selatan. Sumut pasti bisa, asalkan terus menjaga sinergisitasnya" ungkap Mentan.

Menurut Menteri, saat sekarang Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan produksi padi di Indonesia dengan mengubah pola masa tanam. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan luas tanam dan panen atau menjadi 1.000.000 hingga 1,2 juta hektare dari sebelumnya yang masih sekitar 500.000-an hektare. Cara lainnya adalah meningkatkan maksimal produksi di setiap Juli, Agustus, dan September. Sehingga tidak ada lagi lahan tidur di sepanjang bulan.

"Pada bulan-bulan itu, merupakan waktu yang harus dijaga ketat karena merupakan kritikal poin, lintasan kritis untuk masa tanam. Selama ini, pada bulan tersebut jadi masa luas tambah tanamnya defisit sehingga berdampak menjadi bulan paceklik pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Dengan penambahan produksi pada bulan itu sebesar 1.000.000 hingga 1,2 juta hektare, bulan paceklik, yakni Desember hingga Februari, sudah tidak ada lagi"ucap Mentan

Lebih lanjut Mentan memaparkan bahwa perkembangan peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Dimana Indonesia saat sekarang sudah melakukan penurunan impor secara ekstrim yakni sebesar 47 persen, selain itu berdasarkan survey indeks Global Food Security Indeks, skor perubahan lompatan ketahanan pangan Indonesia berada pada urutan ke 66 dari 113 negara.

"Ini merupakan lompatan yang luar biasa dan merupakan perubahan terbesar yang telah kita lakukan. Pencapaian yang telah dilakukan ini merupakan hasil dari



kerja keras bersama. Di sisi lain indeks persentase kepuasan petani kepada pendamping untuk TNI juga luar biasa mencapai 89, 5 persen, ini menunjukkan bahwa sudah ada sinergitas yang baik dan menyatu antara pemerintah, masyarakat juga TNI," papar Mentan.

Mengingat upaya swasembada pangan dan peningkatan produksi pangan sudah keharusan apalagi kebutuhan pangan yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk maka kepada pemerintah daerah, Mentan memperingatkan akan mengurangi alokasi dana anggaran pertanian untuk daerah yang tidak bisa menaikkan produksi bahan pangan. Mentan mengaku serius melakukan tindakan pengurangan bantuan anggaran ke daerah yang produksinya berkurang.

Sebagai contoh pengurangan anggaran untuk Sumatera Utara di tahun 2016. Pada tahun 2016, anggaran sektor pertanian untuk daerah itu tinggal Rp. 854 miliar dari tahun 2015 yang masih Rp. 1,15 triliun.

"Kalau produksi bahan pangan di daerah turun, maka saya akan menurunkan juga bantuan dana anggaran dan alsintan, Jadi peningkatan produksi pangan memang harus serius dilakukan oleh yang terkait. Penurunan anggaran karena Dinas Pertanian Sumut tidak bisa menaikkan produksi padi dan malah turun dari tahun 2015. Pengurangan anggaran tentu disayangkan sehingga harusnya Dinas Pertanian Sumut harus meningkatkan produksi. Saya berharap Gubernur Sumut melakukan hal sama yakni menurunkan anggaran ke pemerintah kabupaten/kota yang tidak bisa mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan" kata Mentan.

Mentan menjelaskan, pada tahun 2016 realisasi anggaran pertanian yang sudah diserahkan ke petani sudah mencapai Rp. 4,3 triliun dari anggaran belanja Kementan yang sebesar Rp 27,58 triliun.

"Kementan siap menambah anggaran atau memberi bantuan untuk kepentingan

peningkatan produksi di daerah yang serius menjalankannya," jelas Mentan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengajak semua pihak yang terlibat bisa bekerja keras untuk memenuhi target tanam agar Sumut kembali sebagai posisi lima besar produksi padi. Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan pertanian di Sumut, di mana hal ini sesuai dengan arahan Presiden bahwa Indonesia harus mampu mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

"Sumut sebagai lumbung pangan nasional yang saat ini berada di peringkat 6. Saat ini Sumut mendapatkan alokasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan terkait upaya pencapaian peningkatan produksi komoditi tanaman padi, jagung dan kedelai/ pajale yang bersumber dari dana APBN. Namun tidak kalah pentingnya dukungan yang dilakukan oleh pemprov melalui APBD mendukung pelaksanaan program pajale hortikultura," ujar Gubernur Sumatera Utara.

Menurut Gubernur Sumatera Utara, pada periode masa tanam bulan Oktober 2015 - September 2016, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan tanam padi sebesar 830.700 hektar dimana pada target Oktober 2015 - Maret 2016 sebesar 418.496 hektar, pemerintah Sumatera Utara telah mencapai realisasi sebesar 446.480 Ha (106,68 persen).

"Untuk rencana tanam bulan April-September, PemProv Sumut harus mampu merealisasikan target tanam seluas 412.204 ha, dimana sebagian dari target tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementan beri bantuan benih padi jagung dan kedelai. Saat ini kita telah mencapai realisasi tanam padi sebesar 164.590 ha (39,93%) dari target April-September," Gubernur Sumut.

Gubernur Sumut memaparkan saat



sekarang produktivitas padi Sumut sebesar 51,75 Kw/Ha yang mana potensi itu masih dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi pertanian yang ada saat ini sehingga peluang untuk meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai masih berpeluang bagi Sumut. Isu-isu strategis di Sumut terkait dengan pembangunan pertanian antara lain, sangat sempitnya kepemilikan lahan petani dengan rata-rata 0,5 hektar/KK sehingga sulit diusahakan untuk mencapai skala ekonomis.

“Selain itu masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian sawah ke non sawah sebesar 2,7 persen per tahun. Walaupun sudah terbit Perda No 3 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tapi alih fungsi ini masih terjadi. Untuk itu, saya harapkan kepada kabupaten dan kota untuk segera menerbitkan peraturan bupati dan walikota terkait hal tersebut. Begitu juga dengan permasalahan kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi di beberapa daerah umumnya masih rendah dan menurunnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian yang masih rendah yakni baru 96,97 persen”

papar Gubernur Sumut.

Gubernur Sumut menegaskan sebagaimana disampaikan Mentan tentu ada penilaian reward dan punishment yang telah berjanji kalau produksi meningkat maka anggaran akan ditambah, tapi kalau menurun akan dikurangi.

“Jadi kepada kabupaten dan kota kita minta jangan hanya meminta tambahan anggaran tapi juga harus meningkatkan laporan produksi sehingga Sumut bisa menjadi swasembada pangan,” tegas Gubernur Sumut.



Mentan, Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Mentan: “Perlunya Integritas Pada Pekerjaan Dalam Bekerja”

“Integritas terhadap pekerjaan sangat dibutuhkan dalam bekerja. Untuk itu Mentan memberikan apresiasi kepada para pegawainya atas hasil kerja sama yang dicapai karena Indonesia adalah salah satu negara yang dapat meraih peningkatan ketahanan pangan terbesar di dunia”

Untuk mendorong semangat para pegawai di lingkup Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Menteri Pertanian kembali memberikan arahan pada para jajaran pegawai yang ada dibawah kepemimpinannya yaitu tiga kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) yakni Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, dan Ditjen Perkebunan.



“Integritas terhadap pekerjaan sangat dibutuhkan dalam bekerja untuk mengabdikan kepada rakyat. Produksi pangan naik adalah target kerja, berat badan turun itu baik, amalan dapat bertambah, karena kita menjadi agen perubahan”, kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura Pasar Minggu, Jakarta Selatan, (28/07).

Mentan memberikan apresiasi kepada para pegawainya atas hasil kerja sama yang dicapai karena berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Global Food Security Index pada Juni 2016 mencatat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang dapat meraih peningkatan ketahanan pangan terbesar di dunia.

“Berdasarkan survei yang dilakukan INDEF pada Maret 2016, tingkat kepuasan responden terhadap kebijakan pembangunan pertanian sebesar 76,80%, terhadap alsintan 75,83%, terhadap pembangunan infrastruktur 71,99%, dan terhadap subsidi benih dan pupuk 79,99%. Survei ini dilakukan di 9 provinsi, 22 kabupaten, 63 kecamatan, 254 desa” jelas Mentan.

Mentan juga mengapresiasi kinerja Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan yang dinilai berhasil melaksanakan

beberapa program kerjanya, di antaranya mengurangi impor bawang merah hingga tahun 2016.

“Dulu kita impor bawang. 2015, ekspor kita naik 90 persen, impor kita turun 77 persen. Tahun ini sampai dengan hari ini belum ada yang impor. Oleh karena itu, dalam 2-3 minggu ke depan nanti, diharapkan mengekspor bawang merah sebanyak-banyaknya” ucap Mentan

Mentan menjelaskan produksi bawang merah per bulan tahun 2016 telah surplus, dan di bulan Agustus nanti sekitar 33.000 ton. Bulan Agustus nanti kurang lebih 33.000 ton. Makanya Indonesia tidak impor tapi harga tetap stabil.

“Saat ini harga bawang merah di tingkat petani masih Rp. 15.000 – 17.000 per kilo gram. Hal itu bisa ditemukan di lapangan penghasil bawang merah seperti di Bima, dan Brebes. Ada yang 15, 16, dan 17. Tapi di kota masih ada Rp. 30.000, ada yang Rp. 36.000,” jelas Mentan.

Untuk mengatasi gejolak harga yang masih tinggi di kota-kota besar, Mentan telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan yang baru.

"Maka ini yang harus kita benahi bersama. Kami sudah diskusi dengan Menteri Perdagangan baru, dalam waktu dekat kami bahas dan selesaikan," ujar Mentan.

Di hadapan pegawai di lingkup Ditjen Hortikultura, Mentan menyampaikan harapannya agar tim kerja perencanaan dapat membuat rencana kegiatan komoditas bawang merah sampai dengan 29 tahun ke depan. Dengan menguatkan faktor pendukung peningkatan produksi.

"Produksi hortikultura naik adalah target kerja. Agar produksi terus digenjot dan kita tidak menginginkan adanya impor. Tidak ada lagi cerita impor, kita harus ekspor, tutup itu rekomendasi impor. Tolong kerjasama dengan Bulog," ungkap Mentan.

Dari Ditjen Hortikultura, Mentan melanjutkan kunjungannya ke Ditjen Tanaman Pangan. Kepada para pegawai di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Mentan memberikan instruksi agar memprioritaskan integrasi penanaman jagung di lahan tanaman perkebunan seluas 720.000 ha. Kementan akan terus genjot produksi padi, jagung, dan kedelai, impor jagung turun kurang lebih 47 persen.

"Kejar lagi produksi untuk bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Ini momentum bagus karena ada La Nina, Kami minta kebutuhan per bulan dihitung dengan baik. Produksi jagung sudah bagus, jangan lagi defisit sampai akhir tahun ini. Areal tanaman jagung tahun ini ada tambahan seluas 700 ribu

hektar, sehingga sekarang areal tanaman jagung total 2 juta hektar," kata Mentan.

Mentan pun meminta supaya kebutuhan per bulan dihitung dengan baik dan diikuti sampai ke lapangan agar produksi ini jangan lagi defisit sampai akhir tahun. Sementara di luar target pertambahan luas tanam tanaman jagung, ada tambahan lagi sekitar 700.000 hektar. Oleh karena itu, diharapkan agar tambah tanam tidak di bawah 1 juta hektar.

"Kementan akan berusaha untuk meningkatkan produksi padi. Yang terpenting, adalah ada pertambahan tanam di bulan Agustus, September dan Oktober. Yang dulu kan 1 juta hektar lebih, sekarang berarti 2 juta hektar. Artinya apa, kalau tidak di bawah 1 juta hektar, itu nanti bulan Desember, Januari, Februari, itu tidak bulan paceklik," pinta Mentan.

Saat mengunjungi Ditjen Perkebunan, Mentan meminta kepada seluruh jajaran Ditjen Perkebunan agar bekerja penuh berkonsentrasi kepada peningkatan produksi gula. Demikian juga untuk komoditas sawit, karet, kakao.

Terkait kebijakan impor jeroan, Mentan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut secara utuh demi kepentingan rakyat. Pemerintah melalui Kementan mencari solusi melalui regulasi agar opsi pemenuhan kebutuhan protein rakyat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau.



Mentan, Andi Amran Sulaiman menjelaskan Kementan menggandeng koperasi untuk mendistribusikan pangan strategis usai penandatanganan MoU di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan

Untuk Pangkas Rantai Distribusi Pangan Kementan Gandeng Koperasi

"Kementan menggandeng koperasi untuk mendistribusikan pangan strategis seperti beras dan bawang merah. Ke depannya koperasi yang dihimpun oleh Kementan akan mendistribusikan bahan pangan dari petani langsung ke konsumen. Targetnya agar koperasi langsung terhubung dengan kelompok tani, sehingga rantai pasoknya terpotong langsung dengan petani"

Untuk memangkas rantai distribusi pangan yang membuat harga selalu komoditas pangan selalu naik maka Kementerian Pertanian melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MoU dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait distribusi pangan. Teknis kerjasama akan dibahas mendalam antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Kementerian Pertanian.

"Kementan akan mereplikasi Toko Tani Indonesia yang sudah berjalan menjadi koperasi pangan nantinya atau bisa juga dengan menambah banyak koperasi-koperasi baru. Kita memperluas jaringan koperasi. Jadi sekarang ini kita perluas Toko Tani Indonesia fokus Jabodetabek" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat usai penandatanganan MoU di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan (30/5).

Mentan menjelaskan Kementan menggandeng koperasi untuk mendistribusikan pangan strategis seperti

beras dan bawang merah. Ke depannya koperasi yang dihimpun oleh Kementerian Pertanian akan mendistribusikan bahan pangan dari petani langsung ke konsumen.

"Target kita bagaimana koperasi langsung terhubung dengan kelompok tani, Jadi rantai pasoknya terpotong langsung dengan petani. Itu target kita, kalau itu terjadi bisa menstabilkan harga pangan," jelas Mentan.



Mentan menyebutkan koperasi nantinya akan langsung konek dengan kelompok tani. Teknisnya, Kementan siapkan alamat petani, Kementerian Koperasi menyiapkan alamat koperasi yang sudah ada. Kedua data itu di sinkronisasikan menjadi satu.

"Target kita bagaimana koperasi langsung connect dengan kelompok tani, bagus kan. Jadi rantai pasoknya terpotong langsung dengan petani. Itu target kita, kalau itu terjadi bisa menstabilkan harga pangan," ujar Mentan.

Menurut Mentan, harga pangan di tingkat pedagang saat sekarang masih melambung tinggi. Misalnya harga bawang merah di tingkat petani sebesar Rp. 15.000 per kilogram (kg) dan begitu berpindah ke pedagang di pasar naik lebih dari dua kali lipat menjadi Rp. 35.000 per kg. Hal itu disebabkan oleh panjangnya rantai pangan yang terjun dalam pendistribusian barang. Menurutnya kenaikan harga pangan dari petani ke konsumen cukup 30% saja. Kenaikan yang terjadi lebih dari 100% seperti saat sekarang dianggap merugikan konsumen.

"Kita ingin membuat struktur pasar baru, sehingga jika ada kenaikan harga pangan cukup 20% sampai 30% ke konsumen dan sudah cukup kenaikan itu, diharapkan dengan adanya kerja sama ini, harga pangan di pasar dapat lebih dikendalikan dengan memotong rantai pasok yang terlalu panjang. Dengan koperasi nantinya bisa kita buat kesepakatan, harga di petani berapa dan di koperasi berapa. Sehingga harga bisa dikontrol dengan adanya harga batas bawah dan atasnya. Kita ingin penandatanganan MoU ini juga dapat mempersingkat waktu penyerapan hasil petani," kata Mentan.

Mentan menuturkan selama ini harga pangan susah dikendalikan karena panjangnya rantai pangan. Selain itu, banyak campur tangan pihak yang menyambung kenaikan harga pangan ditingkat konsumen. Saat sekarang sedikitnya ada 9 tangan yang turut berperan dalam pendistribusian bahan pangan strategis seperti beras dan bawang merah, oleh karenanya 6 tangan harus dipangkas. Rantai pasok yang begitu panjang dipangkas dari 9 menjadi 3 hingga nanti terbentuk struktur pasar baru,

"Pendistribusian pangan di berbagai daerah nantinya dikirim dari sentra penghasil komoditas dari lokasi terdekat. Misalnya di wilayah Jabodetabek yang mendapatkan pasokan pangan dari Banten dan Jawa Barat. Langkah ini juga dilakukan untuk mengurangi mahalanya biaya logistik yang nantinya ditanggung konsumen. Kami mencoba Jabedetabek kita akses dari Banten dan Jawa Barat. Alangkah bagusnyanya ada koperasi," tutur Mentan.

Dengan terbentuknya struktur pasar baru, Mentan berharap semua pihak yang terlibat dalam rantai distribusi pangan dapat mendapatkan keuntungan yang sama.

"Itu kalau terbentuk struktur pasar baru, petani menikmati, konsumen tersenyum, dan petani juga untuk," imbuh Mentan.

Mentan mengatakan pada intinya pemerintah ingin menstabilkan harga pangan strategis. Ada 12 komoditas tapi untuk sementara yang dikerjasamakan baru beras dan bawang, diharapkan bisa memotong rantai pasok. Secara teknis, untuk pengamanan pasokan dan stabilisasi harga pangan di DKI Jakarta misalnya dengan PT Lima Nusa Buana

yang akan bekerja sama dengan Koperasi Pasar wilayah DKI Jakarta. PT Lima Nusa Buana akan bertindak sebagai suplier dan Koperasi Pasar sebagai distributor pemasar untuk memasarkan produk petani guna memenuhi kebutuhan konsumen. Koperasi Pasar juga akan memasarkan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga jual yang wajar

Dalam kesempatan yang sama Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan Kemenkop bersama Kementan telah sepakat bekerja sama mengembangkan distribusi dan pemasaran pangan strategis. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama tentang distribusi dan pemasaran pangan strategis. Nota kesepahaman itu dinyatakan berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat dievaluasi setiap tahun. Kerja sama itu meliputi sinergi program Kementan dengan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Dalam kerjasama dua Kementerian, 30 Koperasi di Jabodetabek akan menyerap hasil produksi para petani. Tujuan menyerap hasil produksi para petani agar membasmis para tengkulak yang membeli produk petani dengan harga murah, namun dijual mahal kepada masyarakat. Selain itu dalam kerja sama tersebut, Kementan akan mendukung koperasi yang berbasis usaha pertanian. Hal ini dilakukan melalui program peningkatan komoditas pertanian. Di sisi lain Kemenkop akan mendukung distribusi produk pertanian melalui koperasi binaan," kata Menkop dan UKM.





Mentan, Andi Amran Sulaiman saat meninjau pembangunan waduk di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto

Kementan Beri Perhatian Lebih Pada Potensi Pertanian Di Daerah

"Kementan telah berhasil mendorong peningkatan produksi hasil pertanian naik 100 persen dan tertinggi selama 19 tahun di negara Indonesia. Hal itu adalah kerja keras pihak terkait semuanya sehingga Indonesia dapat panen hasil pertanian yang melimpah"



Kementerian Pertanian menyadari potensi pertanian di kabupaten Jeneponto memiliki pengaruh sangat besar dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu Menteri Pertanian berjanji akan memberi perhatian lebih kepada Jeneponto terutama dalam hal pengembangan waduk sebagai sumber irigasi pertanian. "Saya akan memberi perhatian lebih kepada Jeneponto, mengingat potensi pertanian Jeneponto, terutama jagung memiliki pengaruh besar dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat" kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat meninjau langsung persoalan pembangunan waduk yang tak kunjung selesai tersebut di Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto (4/6).

Di areal pembangunan waduk Mentan menyampaikan masalah pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan di Jeneponto yang harus segera diselesaikan, apalagi dana untuk perbaikan irigasi sebesar Rp. 700 miliar sudah tersedia. Diharapkan pada tahun 2016 proyek pembangunan waduk tersebut dapat rampung dan segera mengaliri lahan pertanian warga di musim tanam 2018 mendatang. Waduk tersebut diperkirakan dapat mengaliri sekitar 20 ribu hektar areal pertanian warga. Sedangkan dalam hal pengembangan waduk sebagai sumber irigasi pertanian diharapkan juga kepada pemilik lahan yang akan dibangun irigasi Waduk Kelara Kareloe untuk tidak mempersulit pembebasan lahan.

"Saya sudah telpon dirjen untuk mempercepat, tidak menahan dan tidak melakukan pengalihan anggaran. Anggaran pembangunan waduk yang dipersiapkan sekitar Rp 700 miliar yang bersumber dari APBN. Insya Allah pembangunan bendungan di Jeneponto

akan kita selesaikan setelah bendungan di Wajo dan Luwu Utara dengan anggaran Rp. 2 triliun. Dalam pembangunan bendungan Jeneponto yang terlambat. Yang penting jangan kita ego. Jangan terus dipersoalkan lahan 1 hektar belum dibebaskan, bila perlu tanah gratis untuk rakyat, Kalau bendungan di Jeneponto tak selesai hanya gara-gara lahan tanah 1 hektar belum bisa dibebaskan, kami malu kalau tak selesai. Maksimal tahun depan harus selesai ya" ucap Mentan.

Selain mengunjungi Waduk Kelara Kareloe di perbatasan Gowa dan Jeneponto, Mentan juga melakukan panen raya jagung kuning di Kecamatan Taroang, Dusun Kanang-Kanang, Desa Tino, Kecamatan Taruang, Kabupaten Jeneponto.

"Pada tahun ini kita telah berhasil mendorong peningkatan produksi hasil pertanian naik 100 persen dan tertinggi selama 19 tahun di negara tercinta ini. Ini adalah kerja keras kita semua sehingga tahun ini kita dapat panen hasil pertanian yang melimpah" kata Mentan.

Terkait impor, Mentan mengatakan saat sekarang impor jagung turun sampai 47 persen. Impor jagung turun 47 %, adalah sesuatu yang luar biasa, untuk itu Mentan berpesan agar harga jagung harus diawasi terus oleh pemerintah.

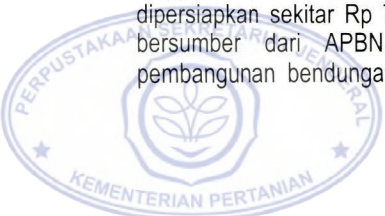
"Kita harus upayakan agar jagung jangan sampai harganya jatuh di pasaran. Kalau harga pembelian jagung yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 2750/kg, maka Bulog tak boleh membeli di bawah harga Rp. 2750/kg," kata Mentan.

Sebagai 'hadiah' Hari Raya Idul Fitri, kepada Pemkab Jeneponto, Mentan memberikan 1 KK 2 hektar pupuk, benih dan herbisida gratis, satu paket berikut pompa air 20 unit dan tambah traktor 10 unit untuk petani jagung.

"Kami sangat mengapresiasi terhadap Pemkab Jeneponto atas penyambutannya. Atas apresiasinya Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan mendapat bantuan 10 traktor dan pompa. Tolong Dirjen dicatat dan segera direalisasikan segera", kata Mentan.

Sementara itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, juga sangat mengapresiasi atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut akan lebih mendorong peningkatan hasil pertanian di Butta Turatea, yang tahun 2016 pertanian dapat melakukan panen dua kali. Sebanyak 300 unit lebih handtraktor bantuan dari Kementan sudah terbagi ke para kelompok tani di Jeneponto dari 1000 kelompok tani yang ada di Jeneponto.

"Pak Menteri sudah memberi kita 300



lebih bantuan handtraktor dari jumlah kelompok tani yang ada, jadi kalau bisa pak Menteri memberikan lagi bantuan alat pertanian, kedatangan Menteri

Pertanian ke Jeneponto, akan membawa angin segar bagi petani Jeneponto. Mudah-mudahan pak Menteri akan memberikan kita bantuan alat pertanian

bagi kelompok tani kita di Jeneponto," ujar Bupati Jeneponto.



Mentan, Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta

Perlunya Penambahan Substansi Dalam UU Karantina Untuk Perkuat Karantina Pertanian

"Agar terwujud penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang efektif, efisien, dan komprehensif, pemerintah bermaksud mengusulkan beberapa substansi dalam rangka penyempurnaan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dengan usulan penambahan beberapa substansi melalui DIM RUU diharapkan RUU Karantina tersebut tidak hanya akan memperkuat upaya perlindungan terhadap sumberdaya pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan"

Kementerian Pertanian menyadari perlu adanya UU tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan substansi yang mengakomodasi berbagai hal mengenai sistem perkarantinaan agar sejalan dengan sistem perdagangan internasional, perkarantinaan internasional, serta integrasi dengan pengawasan keanekaragaman hayati jenis asing invasive, dan Produk Rekayasa Genetik, endanger species untuk mengantisipasi adanya ancaman dalam pelaksanaan pencapaian pembangunan nasional di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Salah satu ancaman yang berpotensi merugikan itu adalah tersebar hama dan penyakit hewan.

Sebelumnya Pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Itu sebagai usaha untuk mencegah masuk dan tersebar hama dan penyakit hewan. Namun, dalam perkembangannya UU tersebut belum mengatur secara lengkap spesifik ketentuan tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Sehingga Undang-Undang itu perlu adanya perubahan, karena usaha perlindungan

sumber daya alam hayati dan peran dalam fasilitas perdagangan belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah.

"Pemerintah atas persetujuan DPR memang telah memiliki UU yang mengatur karantina untuk hewan, ikan dan tumbuhan melalui UU Nomor 16 Tahun 1992. Namun UU itu belum mengatur secara lengkap dan jelas serta hanya secara spesifik mengatur ketentuan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Usaha perlindungan sumber daya alam hayati dan peran dalam fasilitas perdagangan belum dapat dilaksanakan secara optimal," kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta (22/6).

Mentan menerangkan agar terwujud penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang efektif, efisien, dan komprehensif, pemerintah bermaksud mengusulkan beberapa substansi dalam rangka penyempurnaan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, di antaranya, penambahan *Appropriate Level of Protection (ALOP)*. Dengan adanya pengaturan mengenai *Appropriate Level of Protection*, di dalam RUU diharapkan akan memberikan tingkat perlindungan yang lebih baik

terhadap manusia, hewan, ikan, tumbuhan, serta lingkungan.

Menurut Mentan, perlunya penambahan substansi mengenai *Appropriate Level of Protection* dalam Rancangan Undang-Undang Karantina lantaran pelaksanaan analisis risiko media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) akan dapat ditetapkan tingkat perlindungan yang layak.

"Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang telah disusun kepada komisi IV DPR RI. Selanjutnya, Pemerintah akan berpartisipasi dalam pembahasan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sesuai jadwal yang telah disusun dan disampaikan oleh DPR," ujar Mentan.

Dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah, Kementerian Pertanian melakukannya bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendayagunaan Reformasi dan Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Selain lima Kementerian yang ditugaskan Presiden, juga dilibatkan secara intensif

Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta BPOM.

Dengan usulan penambahan beberapa substansi melalui DIM RUU yang disampaikan oleh pemerintah, diharapkan RUU Karantina tersebut tidak hanya akan memperkuat upaya perlindungan terhadap sumberdaya pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Namun juga ikut mengantisipasi bahaya bioterrorisme di dalam negeri melalui media pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK yang dilalulintaskan. RUU tersebut telah memuat hal-hal yang mendasar, strategis, dan memberikan arah bagi penyelenggaraan bagi perkarantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

"Perlu juga penambahan substansi analisis risiko. Analisis risiko diperlukan dalam penyelenggaraan perkarantina dalam rangka memperkuat upaya pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya HPHK, HPIK, dan OPTK berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin mengancam atau membahayakan kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, dan manusia serta lingkungannya. Pelaksanaan analisis risiko dapat melalui mekanisme pre border dalam penyelenggaraan

perkarantina," papar Mentan.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa perlunya penambahan substansi keterelusuran (traceability), sehingga dapat menelusuri riwayat, aplikasi, atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan, hewan, ikan, dan tumbuhan, keamanan dan mutu pangan/pakan mulai dari pra produksi, produksi distribusi, proses pengolahan dan pemasaran untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

Mewakili pemerintah, Mentan mengatakan, Undang Undang karantina yang disusun dapat mengakomodir seluruh hayati di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia memiliki SDA hayati beragam jenis baik itu hewan, ikan dan tumbuhan. Dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, tentu ada ancaman yang dapat merugikan seperti tersebar hama penyakit terhadap ikan, hewan dan tumbuhan.

"Sebagai antisipasi hal tersebut adanya UU ini dapat menjaga ancaman tersebut terjadi. Dan karena UU ini sudah diresmikan atas persetujuan DPR, maka UU No. 16 Tahun 1992 di cabut. Dengan demikian usaha perlindungan

peran dalam fasilitasi di lingkungan hayati secara optimal, Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi DPR dalam prosesnya sehingga penyusunan UU karantina selesai," kata Mentan.

Menanggapi usulan DPR mengenai pembentukan kelembagaan kekarantina yang diatur dalam RUU atau dibentuknya Badan Karantina Nasional dengan maksud untuk menjaga independensi karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta untuk memberikan penguatan dalam penyelenggaraan. Mentan menegaskan hal itu tidak perlu karena Pemerintah berpandangan bahwa mengenai kelembagaan tidak perlu diatur dalam RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

"Organisasi itu bersifat dinamis sehingga pengaturan lembaga pemerintah di dalam UU dapat membatasi fleksibilitas. "Pembentukan kelembagaan pemerintah merupakan kewenangan Presiden dalam menjalankan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 39 tahun 2008. UU dapat membatasi fleksibilitas apabila diperlukan penyesuaian terhadap keberadaan lembaga tersebut" tegas Mentan



Mentan, Andi Amran Sulaiman saat melakukan rapat kerja Komisi IV, di Gedung Parlemen

Kementerian Pertanian melakukan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) dalam APBNP 2016. Sesuai Instruksi Presiden No.4 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran belanja kementerian lembaga (K/L), untuk itu Kementerian Pertanian menghemat atau memotong anggaran.

"Kementerian Pertanian melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp. 3,92 Triliun. Dengan penghematan atau pemotongan tersebut maka anggaran

Kementan Terapkan Self Blocking Untuk Tindaklanjuti Penghematan Anggaran

"Penghematan anggaran akan memberikan dampak pada penurunan target sasaran nasional, penurunan output kegiatan, dan penundaan pelaksanaan kegiatan khususnya pada satker yang mengalami proses penghematan. Sebagai tindaklanjut penghematan anggaran, Kementan menerapkan self blocking yang akan dilakukan melalui RKA KL self blocking"



belanja Kementerian Pertanian 2016 menurun dari Rp. 31,51 triliun menjadi Rp. 27,58 triliun,"kata Menteri Pertanian, Amran Sulaiman saat melakukan rapat kerja Komisi IV, di Gedung Parlemen,

Jakarta, (8/6).

Mentan memaparkan rincian pemotongan anggaran belanja Kementerian pertanian



sebagai berikut Setjen sebesar Rp. 38,3 miliar, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp. 1,07 triliun, Ditjen Holtikultura sebesar Rp. 112 miliar, Ditjen Perkebunan Rp. 747 miliar, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 800 miliar, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp. 992,20 miliar, Badan Litbang Pertanian Rp. 50 miliar, Badan PPSDMP Rp. 50 miliar, Badan Ketahanan Pangan Rp. 25 miliar, Badan Karantina Pertanian Rp. 40 miliar.

"Penghematan anggaran tentunya memberikan dampak pada kegiatan dan target yang ditetapkan pada TA 2016 seperti penurunan target sasaran nasional, penurunan output kegiatan, dan penundaan pelaksanaan kegiatan khususnya pada satker yang mengalami proses penghematan. Beberapa target prioritas yang sudah menjadi komitmen Nawa Cita dan belum dapat dilaksanakan pada TA 2016 akibat pemotongan akan kami geser pada TA 2017. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi meningkatkan target output 2017" papar Mentan.

Mentan mengungkapkan untuk menindaklanjuti penghematan anggaran tersebut, Kementan akan menerapkan self blocking (revisi Dipa tahap I) yang akan dilakukan melalui RKA KL self blocking. Selama revisi ini belum selesai, maka satker yang bersangkutan diminta tidak dapat melakukan proses revisi selain self blocking. Lebih lanjut Mentan menjelaskan bahwa

revisi pemotongan atau melepas self blocking pada revisi Dipa tahap II akan dilakukan setelah disetujuikannya UU APBNP dalam Sidang Paripurna DPR. Sedangkan untuk realisasi serapan anggaran Kementan sampai dengan 7 Juni 2016 mencapai 21,88% terhadap total pagu APBN Tahun 2015 sebesar Rp. 31,51 triliun.

"Persentase serapan anggaran 2016 sebelum penghematan atau pemotongan tersebut lebih tinggi dari serapan anggaran tahun sebelumnya. Meskipun sempat terhenti sementara akibat revisi refocusing, untuk serapan tertinggi dipegang oleh Badan Ketahanan Pangan sebesar 37,37%. Kemudian disusul Inspektorat Jenderal 37,12% dan Badan Karantina 34,85%" jelas Mentan.

Kepada seluruh anggota Komisi IV DPR RI, Mentan juga menjabarkan langkah-langkah persiapan Kementerian Pertanian dalam menyambut hari raya Ramadan dan Idul Fitri 2016 dimana secara umum pada bulan Juni-Juli prognosa ketersediaan komoditas pangan pokok lebih besar dari kebutuhan kecuali kedelai dan daging sapi.

"Untuk menjaga pasok pangan pada Ramadan dan Lebaran tersebut, Kementan pun melakukan berbagai upaya, pertama, melakukan pemetaan lokasi panen Mei-Juli. Ini mencakup peta sebaran produksi tiap kabupaten dan provinsi, luasan dan waktu panen,

pemantauan harga di petani, dan kondisi distribusinya," ujar Mentan.

Mentan menerangkan untuk memperkuat langkah pertama, Kementan pun menggalang komitmen dengan pelaku usaha seperti PT Artha Graha, PT Charoen Pokphand, PT JAPFA Comfeed, PT Sierad Produce, Puskop Polri-TNI, Koperasi Pasar, berbagai asosiasi komoditas, Toko Tani Indonesia, PT Pos Indonesia, Poktan dan Gapoktan, Bulog.

"Untuk jangka panjang, langkah yang akan dilakukan adalah memotong rantai pasok dan mengadakan bazar pangan murah tiap hari di Jabodetabek. Selanjutnya, dalam rangka menurunkan disparitas harga di Jakarta, Kementan melakukan kegiatan pasar murah di beberapa lokasi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Menurut Mentan kegiatan pasar murah di daerah Jakarta Selatan, lokasi pasar antara lain, Pasar Blok A, Pasar Bata Putih, Pasar Blok M, Pasar Cidodol, Pasar Mayestik, Pasar Radio Dalam dan Bukit Duri Puteran. Sementara kegiatan pasar murah di Jakarta Timur lokasi pasar antara lain Pasar Cawang Kavling, Pasar Ciplak, Pasae Jambul, Pasar Pramuka, Pasar Rawabening, Pasar Matraman dan Pasar Klender.







Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
 Jl. Harsono RM No. 3 Jakarta Selatan
 Telp./Fax: (021) 780 4457

humas@pertanian.go.id
 Website: www.pertanian.go.id